

SKRIPSI

PENGARUH PRESIDENSI G20 INDONESIA TERHADAP PENGEMBANGAN KERJASAMA IJEP (*INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT*)



ANNISA NURUL FIRDAUSI

1910521026

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU – ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2023

SKRIPSI

PENGARUH PRESIDENSI G20 INDONESIA TERHADAP PENGEMBANGAN KERJASAMA IJEP (INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

ANNISA NURUL FIRDAUSI

1910521026

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU – ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2023

SKRIPSI

PENGARUH PRESIDENSI G20 INDONESIA TERHADAP PENGEMBANGAN KERJASAMA IJEP (INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)

disusun dan diajukan oleh

ANNISA NURUL FIRDAUSI
1910521026

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 11 Mei 2023

Pembimbing,


Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

**Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar**



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

SKRIPSI

PENGARUH PRESIDENSI G20 INDONESIA TERHADAP PENGEMBANGAN KERJASAMA IJEPA (INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)

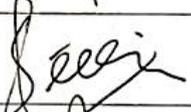
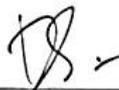
disusun dan diajukan oleh

ANNISA NURUL FIRDAUSI

1910521026

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **15 Mei 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,
TIM PENGUJI**

| No | Nama Dosen | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|---|------------|--|
| 1. | Andi Meganingratna., S.IP., M.Si. NIDN: 0931108002 | Ketua | 1.  |
| 2. | Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.I. NIDN: 0926028502 | Sekretaris | 2.  |
| 3. | Achmad., S.IP., M.Si. NIDN: 0919047402 | Anggota | 3.  |
| 4. | Kardina, S.IP., M.A NIDN: 0922068103 | Anggota | 4.  |

**Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar**



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.

NIDN: 0931108002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Nurul Firdausi

NIM : 1910521026

Program Studi: Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan yang sebenar – benarnya bahwa skripsi yang berjudul **PENGARUH PRESIDENSI G20 INDONESIA TERHADAP PENGEMBANGAN KERJASAMA IJEPA (INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (UU N0. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 15 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Annisa Nurul Firdausi

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan Hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENGARUH PRESIDENSI G20 INDONESIA TERHADAP PENGEMBANGAN KERJASAMA IJEP (INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)** ini dengan penuh kemudahan. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih antara lain kepada :

1. Terkhusus kepada Orang Tua penulis, Ayahanda AKBP(P) Drs. Dg Singai, MM dan Ibunda Dr. Sri Adrianti Muin, S.E., M.Si serta keluarga yang menjadi sumber utama semangat penulis dalam menyelesaikan segala proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
3. Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.Ikom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu – Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
4. Ibu Andi Meganingratna, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dan sekaligus Dosen Penasihat Akademik serta dosen pembimbing yang selama ini telah meluangkan waktunya dan memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan segala proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
5. Jajaran Dosen program studi Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta teori selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kakak Afika Nur, S.H.Int selaku staf Program Studi Ilmu Hubungan Internasional yang telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan di Universitas Fajar Makassar.
7. Bapak Muchamad Syahrhan Bhakti, S.E., M.Si selaku Atase Perdagangan Perwakilan Indonesia – Kairo pada instansi Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan RI yang telah menjadi narasumber pada skripsi ini dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan data dan informasi kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Andi Nabilah Ridwan selaku sahabat dan sekaligus saudara penulis yang selalu meluangkan waktunya, memberikan dukungan, semangat serta motivasi sejak SMP hingga penulis menyelesaikan tugas akhir di perguruan tinggi.
9. Teman – teman angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan di Universitas Fajar Makassar.
10. Teman – teman grup cantik manis yang selalu memberikan dukungan, semangat serta sebagai teman bertukar pikiran bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua aktor yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, skripsi ini masih banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca sebagaimana mestinya serta memberi wawasan yang lebih luas kepada pembaca.

Makassar, 15 Mei 2023

Annisa Nurul Firdausi

ABSTRAK

PENGARUH PRESIDENSI G20 INDONESIA TERHADAP PENGEMBANGAN KERJASAMA IJEPA (INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)

**Annisa Nurul Firdausi
Andi Meganingratna**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Presidensi G20 Indonesia terhadap pengembangan kerjasama Indonesia dan Jepang dalam kerjasama IJEPA. Penelitian ini menggunakan konsep Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Internasional dengan metode penelitian kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yaitu peran strategis dengan mendukung peningkatan ekonomi makro dan sektoral Indonesia, mengoptimalkan peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan terutama meningkatnya aktivitas ekspor – impor. IJEPA memiliki korelasi positif dengan Presidensi G20 Indonesia dan mampu mempererat hubungan antara Indonesia dan Jepang.

Kata Kunci : Presidensi G20, IJEPA, Ekspor, Impor

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF INDONESIA'S G20 PRESIDENCY ON THE DEVELOPMENT OF IJEPA COOPERATION (INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)

**Annisa Nurul Firdausi
Andi Meganingratna**

This research aims to determine the influence of Indonesia's G20 Presidency on the development of cooperation between Indonesia and Japan in the IJEPA collaboration. This study uses the concepts of Economic Diplomacy and International Cooperation with a combination of qualitative and quantitative research methods. The results of this research show that there is an influence, namely a strategic role by supporting the improvement of Indonesia's macro and sectoral economy, optimizing the role of MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises), increasing labor absorption and especially increasing export - import activities. IJEPA has a positive correlation with Indonesia's G20 Presidency and is able to strengthen relations between Indonesia and Japan.

Keywords: G20 Presidency, IJEPA, Export, Import

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| PRAKATA | vi |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACK | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| 1.4.1 Kegunaan Teoritis..... | 6 |
| 1.4.2 Kegunaan Praktis..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1 Landasan Konseptual..... | 7 |
| 2.1.1 Diplomasi Ekonomi..... | 7 |
| 2.1.2 Kerjasama Internasional..... | 14 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 20 |
| 3.1 Rancangan Penelitian..... | 20 |
| 3.2 Kehadiran Peneliti..... | 21 |
| 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 21 |
| 3.4 Sumber Data..... | 21 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 22 |
| 3.5.1 Dokumentasi (Studi Pustaka) | 22 |
| 3.5.2 Wawancara..... | 23 |
| 3.6 Analisis Data..... | 23 |

| | |
|--|-----------|
| 3.7 Pengecekan Validitas Temuan..... | 24 |
| 3.8 Tahap – Tahap Penelitian..... | 24 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN..... | 27 |
| 4.1 Konteks Kerjasama G20 (Group of Twenty)..... | 27 |
| 4.2 Bentuk Kerjasama Indonesia dan Jepang..... | 37 |
| BAB V PENUTUP..... | 58 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 58 |
| 5.2 Saran..... | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 59 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Presentase Perdagangan Barang..... | 44 |
| Tabel 4.2 Data Ekspor – Impor Indonesia dan Jepang 2018 – 2020..... | 46 |
| Tabel 4.3 Data Ekspor – Impor Indonesia dan Jepang 2021 – 2023..... | 47 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan antarnegara sangat beragam, salah satunya adalah kerjasama dalam sektor ekonomi. Pada saat terjadinya krisis ekonomi secara global di Indonesia pada tahun 2009, dimana Indonesia saat itu dapat menjaga persentase perekonomiannya sebesar 4,5% yang pada saat yang sama ekonomi global mengalami penyusutan sebesar 0,8%¹. Pada tahun 2014 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengalami peningkatan sebesar 5% tiap tahunnya². Untuk tetap menjaga dan meningkatkan ekonomi nasional dan internasional, Indonesia bergabung ke dalam organisasi forum G20 atau yang disebut *Group of Twenty*. G20 merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam sektor ekonomi antarnegara. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia terus seimbang, maka hal tersebut dapat menjadi pegangan Indonesia dalam forum G20 agar dapat meningkatkan perhatian investasi infrastruktur dalam negeri.

G20 (*Group of Twenty*) merupakan sebuah forum kerjasama ekonomi antara negara – negara di dunia yang tergabung didalamnya. Sejak forum ini dibentuk pada tanggal 25 September 1999, Indonesia telah

¹ Judha Nugraha, 'Diplomasi Ekonomi Indonesia: G20 Dan Tantangan Global Tahun 2013', *Fiskal Kemkeu*, 2013, 1–13 <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Diplomasi_ekonomi_Indonesia_G20_dan_tantangan_global_tahun_2013.pdf>.

² Pada Perry and others, *Diplomasi Ekonomi Indonesia Di Fora Multilateral: Tinjauan Agenda Presidensi Indonesia Di G20 Tahun 2022* (Jakarta Pusat: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri RI, 2022).

menjadi anggota dari G20³. G20 dinilai dapat memberikan manfaat yang besar untuk ekonomi nasional maupun internasional. Saat ini G20 dinilai dapat menjadi arena model yang tepat untuk memperkuat ekonomi nasional maupun internasional tersebut. G20 adalah forum ekonomi yang dianggap penting terutama oleh negara berkembang, tidak terkecuali seperti Indonesia. Bagi Indonesia sendiri, G20 dapat dijadikan sebagai suatu wadah untuk mempromosikan ekonomi nasional sekaligus ikut berkontribusi dalam memperbaiki perekonomian dunia. Sebagai anggota G20, tentu saja Indonesia dalam mata ekonomi dunia memiliki citra ekonomi yang baik.

Pada tahun 2021, Indonesia memegang peranan penting dalam forum G20 yaitu menjadi Presidensi G20⁴. Presidensi G20 tersebut dimanfaatkan Indonesia dengan sebaik mungkin untuk terus berkomitmen dalam memperbaiki perekonomian nasional maupun internasional. Untuk tetap dapat mempertahankan dan meningkat pertumbuhan perekonomian nasional, maka diperlukan adanya kerjasama ekonomi diantar negara yang mempunyai kepentingan nasional yang sama. Ada banyak kerjasama ekonomi yang dapat dilaksanakan oleh negara – negara tersebut, seperti misalnya melaksanakan diplomasi ekonomi antarnegara. Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, memanfaatkan G20 sebagai sarana strategis untuk Indonesia dalam meningkatkan kepentingan ekonomi nasional melalui diplomasi ekonomi⁵, salah satunya

³ Made Maha Dwi Putra Ida Bagus, Elik Astari Anak Agung, and Indiani Ni Luh, 'Kajian Pemanfaatan Presidensi G20 Indonesia Ditinjau Dari Sektor Perdagangan Bilateral Indonesia Dan Jepang', *Nusantara Hasana Journal*, 2.3 (2022), 269–78.

⁴ *Ibid*

⁵ Cindy Larasati and Ester Desy Natasya, 'Peran Indonesia Di G-20: Peluang Dan Tantangan', *Jurnal Hubungan Internasional*, X.2 (2017), 147–59

diplomasi ekonomi Indonesia dan Jepang didalam suatu kerjasama yang sifatnya bilateral atau dapat disingkat IJEPA (*Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement*).

Hubungan diplomatik yang dibangun antara negara Indonesia dan negara Jepang telah dimulai pada tahun 1958 sejak disahkannya *Treaty of Peace*⁶. Jepang adalah salah satu dari negara maju yang termasuk anggota dari G20. Sebagai negara maju yang memiliki kemajuan pertumbuhan ekonomi serta bisnis yang melaju, Jepang dinilai dapat menjadi partner yang tepat dalam pengelolaan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Diplomasi ekonomi Indonesia dan juga Jepang didalam IJEPA dapat dianggap sebagai suatu hubungan kerjasama ekonomi yang saling melengkapi. Misalnya, Jepang mengeksport produk mobil yang siap dipasarkan ke Indonesia, disatu sisi Indonesia juga mengeksport bahan mentah ke negara Jepang sebagai bahan baku pembuatan mobil tersebut misalnya bijih besi.

IJEPA adalah merupakan suatu satu model kerjasama bilateral dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang, yang bertujuan untuk meningkatkan investasi serta ekspor – impor oleh Indonesia dan Jepang⁷. Kerjasama bilateral IJEPA dilandaskan berdasarkan prinsip EPA (*Economic Partnership Agreement*), dimana

<https://www.researchgate.net/publication/342554611_Peran_Indonesia_di_G-20_Peluang_dan_Tantangan/link/5efb2f8b92851c52d609e88e/download>.

⁶ Seniawati and others, 'Kerjasama Jepang Dan Indonesia', *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 1.2 (2021).

⁷ Avivi Yusron and Siagian Muhnizar, 'Kepentingan Indonesia Dalam Kerjasama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3.1 (2020), 49–61 <<https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2967>>.

adanya hubungan keterbukaan sistem perekonomian pasar di Indonesia dan di Jepang secara adil dan timbal balik. EPA (*Economic Partnership Agreement*) merupakan suatu kerjasama internasional yang memuat aturan – aturan untuk penanaman modal serta yang digunakan sebagai kompelemen dari isi utama kesepakatan⁸.

Sebelum masa presidensi G20, hubungan Indonesia dan Jepang melalui IJEPA sudah dikatakan cukup signifikan. Hal tersebut terlihat dari beberapa manfaat yang dihasilkan dari implementasi IJEPA. Perdagangan barang Indonesia dan Jepang setelah implementasi ijepe pada tahun 2009 hingga sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan senilai 155% dengan nilai ekspor sebanyak 101.7% dan nilai impor 322.1%. Negara Indonesia telah banyak melakukan ekspor dalam bidang jasa bisnis ke negara Jepang serta melakukan impor dalam bidang jasa bisnis juga dalam bidang jasa wisata budaya dari negara Jepang.

Kerjasama bilateral dinilai dapat menjadi strategi tepat dan efektif yang dapat dilaksanakan oleh berbagai negara, terkait dalam hal ini yakni Indonesia dan Jepang. Melalui Presidensi G20 Indonesia, tentunya akan sangat berdampak terhadap kerjasama bilateral antara Indonesia - Jepang. Sebagai negara yang sama – sama menjadi anggota forum G20 untuk mampu meningkatkan perekonomian nasionalnya masing – masing. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai

PENGARUH PRESIDENSI G20 INDONESIA TERHADAP

⁸ Santoso Eko Muji, 'Kerjasama IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement) Dalam Perspektif Strukturalisme', *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 08.01 (2020), 402–9.

PENGEMBANGAN KERJASAMA IJEPA (INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT).

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Fokus didalam penelitian ini yaitu pembaca mendapatkan gambaran terkait apa saja perubahan antara hubungan bilateral Indonesia dan Jepang sebelum Indonesia menjadi Presidensi G20 dan setelahnya serta mengetahui bagaimana pengaruh diplomasi ekonomi dalam kerjasama yang dibangun secara bilateral dalam IJEPA. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menguraikan rumusan masalah yakni : ***“Bagaimanakah pengaruh Presidensi G20 Indonesia terhadap negara Indonesia dan negara Jepang di dalam kerjasama IJEPA?”***

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian dan juga rumusan masalah yang diajukan, peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Presidensi G20 Indonesia dalam kaitannya dengan diplomasi ekonomi di Indonesia dan di Jepang dalam kerangka kerjasama yang tercantum dalam IJEPA.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam aspek teoritis yaitu sebagai bahan acuan maupun referensi untuk kepentingan suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan diplomasi ekonomi dan hubungan kerjasama bilateral antarnegara.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam aspek praktis dimana penelitian ini menyediakan data dan memberikan informasi atau apapun yang berkaitan dengan studi ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan diplomasi ekonomi dan hubungan kerjasama bilateral antarnegara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian yang dibangun dari keterkaitan diantara berbagai konsep serta permasalahan yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lebih jelas dan terstruktur terkait sebuah topik yang akan dibahas. Adapun pada penelitian ini, peneliti akan menguraikan perubahan sistem kerjasama bilateral IJEPA (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*) sebelum dan setelah Presidensi G20 Indonesia. Dalam hal ini terkait dengan peningkatan kapasitas, liberalisasi, serta peningkatan perdagangan, dan juga investasi yang dapat digunakan untuk peningkatan efektivitas pasar antara Indonesia dan Jepang.

2.1.1 Diplomasi Ekonomi

Menurut Pantri dalam artikel jurnal Diplomasi Ekonomi Sebagai Kajian dan Agenda Riset, diplomasi merupakan suatu perpaduan antara ilmu pengetahuan dan seni negosiasi atau dapat dikatakan sebagai metode yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan melalui pelaksanaan perundingan untuk mempertahankan ataupun mendapatkan pencapaian di dalam kepentingan nasional terkait aspek ekonomi dan politik, sosial dan

perdagangan, budaya dan pertahanan militer dan yang lain sebagainya⁹.

Dalam buku *Kauliya's Concept of Diplomacy : a new interpretation*, Kauliya menjelaskan bahwa konsep diplomasi mempunyai keutamaan tujuan yakni melakukan pengamanan terhadap kepentingan untuk negara masing – masing. Sebuah negara apabila akan memulai ataupun melaksanakan praktik diplomasi terhadap negara – negara lain tentu memiliki aturan hukum yang mengikat. Pelaksanaan praktek diplomasi diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1961 tentang hubungan diplomatik yang menjadi dasar hukum dari praktek diplomasi. Seiring perkembangan zaman diplomasi juga terus mengalami perkembangan. Untuk dapat memenuhi kepentingan nasional dalam hal ekonomi negara melakukan praktek diplomasi ekonomi.

Menurut Okano – Heijmans, dalam artikel jurnal yang membahas mengenai diplomasi ekonomi yang dilaksanakan Indonesia dengan Bangladesh menyatakan bahwa diplomasi ekonomi dapat dipahami sebagai suatu hal yang melibatkan sarana politik melalui negosiasi baik secara internasional yang mempunyai tujuan khususnya di dalam pencapaian kemakmuran dalam aspek ekonomi nasional. Dalam studi ilmu hubungan internasional, konsep dari diplomasi ekonomi ini menjadi sangat penting. Hal tersebut dikarenakan, pada prakteknya ia telah dipakai sejak lama

⁹ Muthriana Erza Killian Pantri, 'Diplomasi Ekonomi Sebagai Kajian Dan Agenda Riset: Isu Praktis, Konseptual Dan Metodologis', *Global & Strategis*, 15.1 (2021), 60 <<https://doi.org/10.20473/jgs.15.1.2021.51-78>>.

oleh negara – negara dalam menjalankan praktek luar negerinya¹⁰. Kemudian, menurut Bayne & Woolcock, dalam artikel jurnal yang membahas mengenai strategi yang dilakukan dalam diplomasi ekonomi oleh Indonesia dalam rangka stabilitas di dalam neraca perdagangan pada saat pandemi Covid-19. Diplomasi ekonomi ini memiliki salah satu karakter utama yang dapat dikatakan sangat sensitif serta sangat bergantung pada perubahan dan perkembangan dunia pasar¹¹.

Dalam penelitian dengan fokus melakukan analisis terhadap kebijakan diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh negara Indonesia ke pasar – pasar non tradisional terkait tantangan dan peluangnya, Arystankulova menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi adalah diplomasi yang berfokus pada bagaimana sebuah negara membuat ataupun mengambil keputusan menggunakan ekonomi sebagai alat untuk mencapai kepentingan ekonomi dalam negeri. Diplomasi ekonomi mempunyai program/agenda yang menyeluruh karena diplomasi ekonomi juga saling terkait dengan bagaimana peluang investasi, perjanjian perdagangan bahkan dalam hal komunikasi ataupun interaksi dalam mencapai kepentingan nasional oleh negara dalam aspek ekonomi. Dengan demikian, setiap negara tentu saja akan melihat sejauh apa kapabilitas yang ia miliki untuk menggunakan kesempatan yang ada agar diplomasi

¹⁰ Denura Jihan Salsabilla and Sari Viani Puspita, 'Diplomasi Ekonomi Indonesia Ke Bangladesh: Studi Kasus Ekspor Gerbong Kereta', *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3.2 (2021), 212–27 <<https://doi.org/10.24198/padmir.v3i2.31172.33468>>.

¹¹ Nabilla Natasha, 'Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Neraca Perdagangan Di Tengah Pandemi Covid-19', *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8.2 (2021), 227–39 <<https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.15925>>.

ekonomi yang ia lakukan dapat memenuhi kepentingan nasionalnya¹².

Dalam artikel jurnal *Diplomasi Ekonomi Jepang Dalam Upaya Perpindahan Limbah B3 Melalui Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*, diplomasi ekonomi ialah seluruh tindakan ekonomi yang dilakukan oleh negara dalam menjalankan misi hubungannya dengan negara lain dengan tujuan untuk mengoptimalkan kepentingan nasionalnya dalam segala bidang termasuk ekonomi¹³. Diplomasi ekonomi dapat dipahami sebagai suatu instrumen dari kepentingan nasional dalam mengelola kepentingan suatu negara dengan hubungan luar negerinya. Diplomasi ekonomi dalam hal ini tidak hanya untuk kepentingan ekonomi suatu negara melainkan untuk tetap meningkatkan kepentingan bersama ataupun kepentingan rakyat. Diplomasi ekonomi yang dilakukan negara memiliki wujud yang beragam misalnya, ekspor impor, melakukan kerjasama yang meningkatkan pertukaran investasi asing, pinjaman luar negeri serta kerjasama lainnya dalam sektor ekonomi¹⁴.

Dalam praktek diplomasi ekonomi, negara – negara melakukan diplomasi ekonomi mereka tidak selalu dalam cara yang sama. Negara cenderung melakukan praktek tersebut secara

¹² Mariane Olivia Delanova, 'Analisis Kebijakan Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Pasar Non Tradisional: Tantangan Dan Peluang', *Dinamika Global Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 4.2 (2019), 382–402.

¹³ Anggraeni Nurshinta Anggia, 'Diplomasi Ekonomi Jepang Dalam Upaya Perpindahan Limbah B3 Melalui Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)', *PIR*, 3.2 (2019), 156–72.

¹⁴ Jernadu Ph D Prof. Aleksius and others, *Kinerja Diplomasi Ekonomi: Evaluasi Atas Perjanjian Perdagangan Dan Investasi*, ed. by Fikry Cassidy (Jakarta Pusat: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri RI, 2015).

berbeda – beda. Misalnya, menurut Killian, Indonesia melakukan diplomasi ekonominya dengan empat agenda utama yaitu promosi dagang, pariwisata, investasi serta kerjasama pembangunan. Sedangkan menurut Kementerian Luar Negeri Jepang tahun 2019, dalam melaksanakan diplomasi ekonomi Jepang memiliki tiga fokus tujuan utama yaitu meningkatkan aturan yang diterapkan secara global yang dapat mendukung adanya keterbukaan ekonomi, serta memberikan dukungan untuk perusahaan – perusahaan ekspansi global serta promosi diplomasi sumber daya dan *inward investment* ke Jepang¹⁵.

Salah satu bentuk diplomasi ekonomi antara Indonesia dan negara lain yaitu, G20 (*Group of Twenty*). Dengan adanya G20 negara – negara yang berada didalam kelompok tersebut dapat saling melakukan berdiplomasi untuk mencapai kepentingan nasional masing – masing negara serta mencapai kepentingan internasional dalam hal menjaga perekonomian dunia agar tetap stabil dan meningkatkan perekonomian dunia.

Dalam penelitian ini juga meninjau dari penelitian sebelumnya, yaitu pertama bersumber dari tulisan Ida Bagus Made Maha Dwi Putra dkk yang mengkaji mengenai pemanfaatan terpilihnya Indonesia sebagai Presidensi G20 dilihat dari aspek perdagangan bilateral negara Indonesia dan negara Jepang¹⁶.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam perjanjian

¹⁵ Pantri Muthriana Erza Killian, 'Diplomasi Ekonomi Sebagai Kajian Dan Agenda Riset: Isu Praktis, Konseptual Dan Metodologis', *Global & Strategis*, 15.1 (2021), 65 <<https://doi.org/10.20473/jgs.15.1.2021.51-78>>

¹⁶ Ida Bagus, Made Maha Dwi Putra, Elik Astari Anak Agung, and Indiani Ni Luh, 'Kajian Pemanfaatan Presidensi G20 Indonesia Ditinjau Dari Sektor Perdagangan Bilateral Indonesia Dan Jepang', *Nusantara Hasana Journal*, 2.3 (2022), 269–78

kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang IJEPA memiliki banyak manfaat bagi kedua negara ini. Manfaat tersebut digunakan untuk saling melengkapi kebutuhan antara Jepang dan Indonesia. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam perjanjian bilateral antara keduanya memiliki kepentingan satu sama lain. Kepentingan Indonesia adalah terkait dalam aspek perdagangan khususnya bidang perikanan, dimana Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor yang dominan terhadap Jepang dan investasi yang disalurkan Jepang ke Indonesia. Kemudian Jepang memiliki kepentingan dalam bidang sumber daya mineral dan juga investasi. Kajian ini mengadopsi konsep kerangka pemikiran diplomasi dalam aspek ekonomi yang digunakan untuk mendeskripsikan alur kerjasama di antara negara Indonesia dan negara Jepang dalam bingkai kerjasama bilateral IJEPA. Tidak lupa pula penelitian ini juga menjelaskan bahwa G20 dan ASEAN dapat saling memantapkan peranan yang cukup kuat Indonesia dalam ASEAN sehingga menjadi landasan atas dasar yang kuat dalam G20. Keterlibatan Indonesia dalam forum G20 dan juga menjadi presidensi G20 berpengaruh terhadap kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang. Posisi Indonesia adalah *global buyer* yang signifikan bagi dunia dikarenakan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang bisa dikatakan stabil sehingga berdampak terhadap stabilnya pertumbuhan di bidang ekonomi yang termasuk di dalam negara kawasan ASEAN.

Rujukan pustaka yang kedua yaitu, dalam artikel yang ditulis oleh Jihan Salsabilla Denura dan Viani Puspita Sari yang berjudul "Diplomasi Ekonomi Indonesia ke Bangladesh: Studi Kasus Ekspor

Gerbong Kereta”¹⁷. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa peran diplomasi Indonesia dalam kaitannya dengan ekspor gerbong kereta terutama di tahap penawaran. Terutama dari segi demografi, banyak kesamaan antara Indonesia dan Bangladesh. Maka dari itu, ketika kedua negara ini acap kali bertemu dalam forum skala internasional yaitu KTT IORA hal tersebut menjadi *theatre* riset dan juga kemudian melihat dari pandangan bahwa adanya keuntungan yang dapat dimanfaatkan pada pertemuan bilateral antarnegara pada penelitian yang dilakukan oleh Jihan dan Viani. Hasilnya adalah Indonesia dan Bangladesh, keduanya mempunyai kondisi nasional dan juga internasional yang mengacu pada kesepakatan ekspor. Dalam proses diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia dan Bangladesh juga terdapat pelaku di dalam dan di luar negeri yang saling bekerja sama. Selanjutnya diplomasi ekonomi dikatakan baik jika tidak semata berfungsi ketika terjadi proses penawaran tetapi juga menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan.

Adapun rujukan pustaka yang ketiga yaitu artikel yang ditulis oleh Panthri Muthriana Erza Killian dalam artikelnya yang berjudul “Paradigma dan Problematika Diplomasi Ekonomi Indonesia”¹⁸. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa adanya tekanan yang terjadi baik internal maupun secara eksternal dapat membuat setiap negara harus menyesuaikan terhadap strategi pelaksanaan diplomasi

¹⁷ Jihan Salsabilla Denura and Sari Viani Puspita, ‘Diplomasi Ekonomi Indonesia Ke Bangladesh: Studi Kasus Ekspor Gerbong Kereta’, *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3.2 (2021), 212–27 <<https://doi.org/10.24198/padmir.v3i2.31172.33468>>

¹⁸ Killian P.M Erza, ‘Paradigma Dan Problematika Diplomasi Ekonomi Indonesia’, *Global & Strategis*, 6.2 (2012), 170–85.

ekonomi. Pada Indonesia kasusnya, kelemahan pada diplomasi bidang ekonomi berada pada bagaimana manajemen ekonomi secara eksternal pada khususnya serta koordinasi juga minimnya peranan di sektor privat di dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan. Pada kasus ini, masing – masing pihak baik sektor swasta akan menanggung dan mengalami kerugian yang terbesar disebabkan belum dapat kesiapan diri yang maksimal, hal ini juga berarti memperlihatkan kegagalan koordinasi secara internal sebelum pelaksanaan kebijakan itu disetujui dan diimplementasikan. Dengan mengacu terhadap kegagalan sebelumnya tentu saja, praktek diplomasi bidang ekonomi di Indonesia perlu dikerahkan dalam upaya membentuk model suatu diplomasi ekonomi yang inovatif, menyeluruh serta inklusif yang memungkinkan tujuan nasional bisa dicapai.

2.1.2 Kerjasama Internasional

Dalam memenuhi kepentingan nasional suatu negara, kerjasama internasional dapat menjadi cara untuk memenuhi kepentingan tersebut. Menurut Keohane dalam Liana dan Viani, kerjasama internasional bermula pada saat pelaku atau negara – negara ada dalam kondisi ketika kebijakan setiap negara untuk mencapai tujuannya (tidak melihat terlebih dahulu kepentingan negara lain) akan dianggap oleh negara lain sebagai tantangan terhadap tujuan mereka. Maka dari itu, kerjasama secara internasional terwujud saat negara menempatkan perilakunya terhadap perilaku negara lain melalui sebuah koordinasi

kebijakan¹⁹. Kerjasama internasional berasal dari keadaan dan situasi interdependensi diantara setiap negara. Adanya isu – isu terkait ekonomi seperti keseimbangan (*equilibrium*), hambatan dalam perdagangan, serta nilai tukar dapat dianggap menjadi isu yang secara umum mencerminkan interdependensi negara – negara. Selain itu, menurut Koesnadi Kartasasmita dalam Zulkifli menjelaskan bahwa kerjasama internasional adalah sebuah keharusan yang terjadi sebagai akibat dari adanya hubungan interdependensi dan bertambahnya kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat Internasional²⁰.

Adapun kerjasama internasional menurut K.J Holsti dalam Era Riani adalah kerjasama internasional dapat diartikan dalam lima definisi yaitu, kerjasama internasional merupakan suatu konsep dimana dua atau lebih tujuan, nilai maupun kepentingan yang cocok untuk memperoleh sesuatu secara sekaligus bagi semua pihak. Definisi kedua yaitu kerjasama internasional adalah sebuah konsep ataupun pengharapan dari suatu negara terkait kebijakan yang diambil negara lain dapat membantu kepentingan negara tersebut. Adapun definisi ketiga yaitu, kerjasama internasional adalah persetujuan ataupun sebuah masalah di antara kedua negara ataupun lebih. Ketika memiliki kesamaan kepentingan atau sebaliknya memiliki perbedaan kepentingan. Definisi keempat yaitu, kerjasama internasional merupakan sebuah aturan tertulis yang

¹⁹ Liana Hasanah, 'Kerjasama Indonesia-Jepang Dalam Joint Credit Mechanism (JCM) Pada Pembangunan Rendah Karbon Di Indonesia', 1.2 (2019), 142–55 <<https://doi.org/10.24198/padmir.v1i2.>>.

²⁰ Zulkifli, 'Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia)', 2012.

resmi atau tidak resmi terkait transaksi yang dilakukan dimasa depan yang dilakukan untuk menjalankan persetujuan. Kemudian definisi kelima yaitu, kerjasama internasional adalah suatu transaksi di antara negara satu dan negara lain untuk memperoleh persetujuan mereka²¹.

Bentuk – bentuk kerjasama internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan siapa pihak yang terlibat didalamnya, misalnya kerjasama multilateral, regional, trilateral maupun bilateral. Kajian penulis dalam penelitian ini terkait pembahasan kerjasama bilateral dan juga kerjasama multilateral dalam bidang ekonomi. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang didalamnya hanya terjalin dua negara. Selanjutnya, kerjasama multilateral merupakan suatu kerjasama di antara dua atau lebih negara yang tidak terbatas pada wilayah²². Dalam penelitian ini, kerjasama bilateral yang dimaksud yakni pelaksanaan kerjasama di antara negara Indonesia dan negara Jepang (IJEPA). Selanjutnya, kerjasama multilateral yang dimaksud adalah G20.

Dapat disimpulkan bahwa maksud utama negara melaksanakan kerjasama internasional tidak lain adalah untuk mencapai tujuan nasionalnya. Kerjasama internasional dapat dilaksanakan apabila paling tidak memiliki dua syarat utama yakni, adanya kewajiban untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi kepentingan nasional setiap negara yang terlibat kerjasama

²¹ Riana Era, 'Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Dalam Mendukung Program One Village One Product (OVOP) Di Indonesia 2013-2015', 3.1 (2016), 1–6.

²² Yusron, Avivi, and Siagian Muhnizar, 'Kepentingan Indonesia Dalam Kerjasama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3.1 (2020), 49–61 <<https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2967>>

tersebut. Selain itu, terdapat keputusan bersama di dalam kerjasama internasional dapat menyelesaikan setiap persoalan yang timbul.

Rujukan pustaka dalam penelitian ini yang pertama adalah artikel yang ditulis oleh Liana Hasanah dan Viani Puspitasari, judulnya adalah “Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Joint Credit Mechanism (JCM) pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia”²³. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Liani dan Viani, JCM (*Joint Credit Mechanism*) adalah kerjasama bilateral dalam aspek lingkungan hidup yang dilakukan oleh negara Jepang dan negara – negara berkembang lainnya. Pelaksanaan kerjasama ini dapat dilihat melalui 3 (tiga) aspek yaitu, 1) adanya kepentingan yang sama di kedua negara, 2) partisipasi/peran pihak yang terlibat, 3) hasil yang didapatkan oleh pihak yang terlibat. Terkait kepentingan nasional masing – masing antara Indonesia dan Jepang, kedua negara tersebut sama – sama negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Salah satu tujuan dari kerjasama JCM adalah untuk melakukan upaya – upaya penanganan (mitigasi) serta adaptasi terhadap iklim. Dalam kerjasama JCM, negara Indonesia dan negara Jepang sama – sama berperan dalam penandatanganan kesepakatan, menghasilkan keputusan dalam komite dalam menerbitkan kredit karbon sebagai efek samping dari proyek – proyek JCM. Dengan adanya kerjasama JCM,

²³ Hasanah, Liana, ‘Kerja Sama Indonesia-Jepang Dalam Joint Credit Mechanism (JCM) Pada Pembangunan Rendah Karbon Di Indonesia’, 1.2 (2019), 142–55 <<https://doi.org/10.24198/padjir.v1i2.>>

kepentingan Indonesia dan Jepang dapat terpenuhi sekaligus memberikan keuntungan bagi kedua negara tersebut.

Adapun rujukan pustaka yang kedua adalah artikel yang ditulis oleh Yusron Avivi dan Muhnizar Siagian yang berjudul “Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)”²⁴. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kerangka perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang dalam kerjasama bilateral IJEPA meliputi, liberalisasi, investasi, perdagangan, perlindungan, hak kekayaan intelektual, transparansi, serta memperdalam kerjasama dan menetapkan aturan – aturan untuk menegakkan perjanjian. Adapun kepentingan Indonesia dalam perjanjian IJEPA adalah mengoptimalkan kerjasama antara Indonesia dan Jepang, memperoleh kepastian akses pasar di Jepang yang lebih luas dengan adanya penurunan tarif, memperoleh transfer teknologi, sebagai sektor penggerak serta menjadi pusat pengembangan manufaktur Indonesia. Diplomasi ekonomi yang diupayakan oleh Indonesia dalam kerjasama bilateral ini didasarkan oleh beberapa faktor seperti, latar belakang Indonesia dan Jepang, hubungan perdagangan yang saling menguntungkan serta kemajuan perekonomian Jepang.

Kemudian, rujukan pustaka yang ketiga yaitu artikel yang ditulis oleh Seniwati. Munif Arif Ranti, Oktaviano Nandito Guntur dan

²⁴ Yusron, Avivi, and Siagian Muhnizar, ‘Kepentingan Indonesia Dalam Kerjasama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3.1 (2020), <<https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2967>>

Ibnu Aly Badiu yang berjudul “Kerjasama Jepang dan Indonesia”²⁵. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Indonesia telah memiliki hubungan yang baik dengan Jepang. Kedua negara tersebut memulai hubungan diplomatiknya pada bulan Januari 1958, melalui perjanjian damai. Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan kerjasama hampir pada semua sektor seperti ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kerjasama bilateral antara keduanya meliputi, IJEPA (Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement), perjanjian perdagangan bebas (FTA), serta kemitraan ekonomi komprehensif perjanjian (CEPA) dengan negara – negara yang menjadi anggota Asosiasi Bangsa Asia Tenggara yaitu ASEAN. Adapun kerjasama bilateral IJEPA memberikan pengaruh positif bagi kedua negara tersebut misalnya pada masa pandemic Covid – 19 yang mengakibatkan kemerosotan perekonomian negara bahkan dunia. Terjadinya PHK (Pemutusan Hak Kerja) oleh perusahaan – perusahaan mengakibatkan naiknya angka pengangguran. Oleh karena itu, melalui pertemuan antara Indonesia dan Jepang dalam hal ekonomi khususnya dapat membuat peningkatan yang signifikan pada bagian industri manufaktur. Indonesia dan Jepang sepakat untuk melakukan kerjasama bilateral pada sektor tersebut dan Jepang kemudian memberikan bantuan untuk Indonesia dalam hal meningkatkan perindustrian di Indonesia.

²⁵ Seniwati, Ranti Munif Arif, Guntur Oktaviano Nandito, and Badiu Ibnu Aly, ‘Kerjasama Jepang Dan Indonesia’, *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 1.2 (2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kombinasi (*mix method*). Penelitian kombinasi adalah suatu metode yang menggabungkan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan konsep *sequential explanatory design* yaitu dengan urutan pembuktian dan urutan penemuan. Konsep ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data serta melakukan analisis data yang berbentuk kuantitatif di tahap awal lalu pengumpulan data juga analisis data yang berbentuk kualitatif yang bermanfaat dalam memperjelas hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya yakni metode kuantitatif ditahap awal²⁶. Peneliti di dalam penelitian ini mengambil data kualitatif yang didapatkan dari wawancara dengan informan penelitian berupa peranan presidensi G20, manfaat implementasi IJEPA, pengaruh presidensi G20 Indonesia terhadap IJEPA, hubungan kerjasama Indonesia dan Jepang, serta pengaruh presidensi G20 Indonesia terhadap diplomasi ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Selain itu, peneliti juga mengambil data kuantitatif yaitu nilai ekspor – impor antara negara Indonesia dan negara Jepang.

²⁶ Prof Dr Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, ed. by Sofia Yustiyani Suryandari, Kedua (IKAPI (Anggota Ikatan Penerbit Indonesia), 2018).

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di dalam penelitian ini yakni peneliti itu sendiri. Dalam penelitian Syarifah, Lincoln dan Guba menjelaskan bahwa manusia dapat dikatakan instrument dalam proses pengumpulan data karena dapat memberikan keuntungan agar bisa lebih flexibel secara adaptif, selain itu manusia juga bisa memakai seluruh alat inderanya untuk melakukan sesuatu²⁷. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat penuh dalam mengerjakannya.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dijalankan di Kantor Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia serta mencari data melalui *source internet* (sumber internet). Adapun waktu penelitian dijalankan pada bulan Januari – April 2023.

3.4 Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian ini yakni berasal pada informan penelitian merupakan setiap orang yang bisa memberikan informasi. Menurut Sukandarumidi, Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga atau organisasi, yang sifat keadaanya diteliti²⁸. Sumber – sumber berita baik berita cetak ataupun berita dalam bentuk elektronik yang menjelaskan hal-hal yang terkait dengan tujuan fundamental riset yakni menjelaskan pengaruh presidensi G20 Indonesia

²⁷Syarifah Zhavira Maziyya, 'Bab III Metodologi Penelitian', 2014.

²⁸ Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, 2004.

terhadap diplomasi ekonomi Indonesia dan Jepang dalam kerjasama IJEPA, yang terkait dengan perubahan sistem kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang sebelum dan setelah Presidensi G20 Indonesia serta diplomasi ekonomi Indonesia dan Jepang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, peneliti memerlukan adanya sebuah data untuk hasil akhir dari penelitian. Adapun pengumpulan data yang aktual, peneliti memakai beberapa teknik pengumpulan data yakni :

3.5.1 Dokumentasi (Studi Pustaka)

Metode dokumen atau metode penelitian kepustakaan ini tidaklah rumit dalam artian jika ada kesalahan, sumber informasinya masih sama, tidak berubah. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti sesuatu yang tertulis. Para ahli selalu menafsirkan dokumen dalam dua pengertian, yaitu: pertama, sumber informasi sejarah yang tertulis, bukan kesaksian lisan, artefak, lukisan, dan sebagainya. Kedua, untuk surat-surat resmi dan surat-surat pemerintah seperti kontrak, undang-undang, hibah, konsesi dan lain-lain.

Metode studi pustaka kemudian di implementasi di Kantor Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, misalnya dokumen-dokumen yang berupa media cetak yakni buku-buku, kemudian peneliti juga menggunakan berita serta jurnal artikel yang relevan dengan masalah yang diteliti dimana hal tersebut merupakan sumber utama yang dipakai oleh

peneliti, juga hasil-hasil penelitian yang sejalan pada fokus penelitian. Sumber berita, baik cetak maupun elektronik, terutama mengenai isu-isu yang berkaitan dengan tujuan utama penelitian yakni menemukan perubahan sistem kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang sebelum dan setelah Presidensi G20 Indonesia serta diplomasi ekonomi dalam IJEPA.

3.5.2 Wawancara

Selain karena pengumpulan data memerlukan waktu yang cukup lama, peneliti juga harus memikirkan penerapan metode wawancara. Menyebarkan kuesioner kepada responden dan meminta tanggapan tertulis lebih mudah dibandingkan mencari jawaban responden secara langsung. Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Ada dua pihak dalam percakapan, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan. Wawancara dilakukan melalui dialog dan tanya jawab dengan informan yang representatif. Hasil wawancara kemudian dituangkan dalam struktur ringkas, dimulai dengan penjelasan singkat mengenai identitas, mendeskripsikan situasi atau konteks, mengidentifikasi masalah, mendeskripsikan data, menyatukan, dan diakhiri dengan munculnya tema.

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah hal terpenting dalam upaya menemukan hasil penelitian. Analisis data adalah proses pengumpulan data untuk interpretasi. Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data

dan setelah pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode analisis konsep *sequential explanatory design*, yaitu. urutan yang jelas dan urutan penemuan. Peneliti melakukan analisis data kaitannya dengan fokus penelitian dan rumusan masalah untuk memperoleh temuan penelitian yang bermakna.

3.7 Pengecekan Validitas Temuan

Metode analisis data yang digunakan harus sesuai dengan ciri-ciri penelitian kombinasi yaitu analisis data induktif. Pemeriksaan kebenaran data digunakan untuk memastikan kebenaran data yang diterima. Dengan meningkatkan ketekunan Anda dalam wawancara, informasi dan rangkaian kejadian dapat terekam secara andal dan sistematis. Untuk menjamin keakuratan informasi, sesuatu selain data digunakan untuk memeriksa dan membandingkan informasi yang diterima.

3.8 Tahap – Tahap Penelitian

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari subbab yang disesuaikan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I memuat uraian gambaran singkat mengenai krisis ekonomi global dan Indonesia berhasil bertahan ketika krisis ekonomi global tersebut terjadi, salah satunya berkat adanya G20. Pada bab I juga memuat tentang penjelasan singkat mengenai G20, manfaat serta tujuan dari adanya forum tersebut. Bab I juga memuat

gambaran umum mengenai penjelasan terkait diplomasi ekonomi serta terdapat fokus penelitian dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II yang berisi tinjauan pustaka, peneliti memaparkan kepustakaan – kepustakaan berupa penelitian yang telah ada sebelumnya terkait dengan tema penelitian. Selain literatur yang telah ada, terdapat pula tinjauan konsep yang dimana peneliti menggunakan konsep diplomasi ekonomi dan kerjasama internasional.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III yang berisi metode penelitian, peneliti memberikan pemahaman mengenai metode penelitian yang dipahami secara luas sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dari menentukan topik, pengumpulan data, serta analisis data sampai dengan pemahaman tentang topik, gejala ataupun isu tertentu. Pada Bab III juga menjelaskan tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan validitas data dan tahap – tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV hasil penelitian, peneliti memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan berupa penelitian sekunder dengan

menjawab pertanyaan dari fokus penelitian dan rumusan masalah yang menjadi tema dan tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V, sebagai penutup akan memuat kesimpulan dan saran dari keseluruhan bab yang ada dalam penelitian skripsi. Peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran yang dapat dipahami oleh pembaca, baik dosen maupun mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian terkait dengan judul penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Konteks Kerjasama G20 (*Group of Twenty*)

G20 (*Group of Twenty*) merupakan suatu forum kerjasama multilateral yang didalamnya terdiri 19 negara utama dan juga Uni Eropa (EU). G20 memajukan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan dunia serta 80% PDB global. Anggota dari G20 yaitu Indonesia, Jepang, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Arab Saudi, Australia, Argentina, Brasil, Inggris, India, Italia, Jerman, Meksiko, Kanada, Rusia, Republik Korea, Turki, Tiongkok, Perancis serta Uni Eropa²⁹. G20 mulai dibentuk pada tahun 1999 atas usulan dari negara anggota G7. *Group of Seven (G7)* adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari tujuh negara terbesar di dunia dengan ekonomi maju. G7 beranggotakan : Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat.

G20 adalah sebuah forum yang lahir dari kegagalan komunitas internasional terhadap negara G7. Pada waktu itu, negara – negara yang tergolong berpendapatan yang menengah dan mempunyai dominasi ekonomi menurut sistemik dianggap fundamental untuk dilibatkan dalam forum agar mendapatkan penyelesaian terkait persoalan ekonomi internasional. G20 kemudian mempersatukan negara maju serta negara

²⁹ Bank Indonesia, 'Presidensi G20 Indonesia', *Bank Sentral Republik Indonesia*, 2020. <https://www.bi.go.id/id/g20/default.aspx> (diakses tanggal 3 Maret 2023)

berkembang agar bahu – membahu bekerjasama dalam mengatasi krisis ekonomi, terlebih pada Asia, Amerika Latin serta Rusia³⁰.

Salah satu permasalahan negara di dunia adalah permasalahan ekonomi. Ekonomi internasional menjadi suatu dialog yang menjadi isu tidak pernah surut. Masing – masing negara di belahan dunia terus menerus menyusun berbagai macam strategi untuk tetap menggerakkan ekonomi nasional mereka³¹. Krisis moneter pada tahun 1997-1998 disebabkan oleh adanya penurunan harga asset, bisnis serta konsumen mengalami kesulitan membayar utang dan adanya kekurangan likuiditas pada lembaga keuangan. Krisis ini juga disertai adanya kepanikan dari investor yang melakukan penjualan aset ataupun menarik uang dari rekening tabungan milik mereka dikarenakan para investor tersebut takut nilai dari investasi mereka menurun. Adapun penyebab lainnya adalah krisis moneter juga dipengaruhi oleh pecahnya gelembung keuangan spekulatif, adanya gagal bayar pemerintah, merosotnya pasar saham dan krisis mata uang³².

G20 merupakan sebuah solusi atas krisis ekonomi dunia pada tahun 1997 hingga 1998. Krisis ekonomi tersebut mengakibatkan menurunnya nilai tukar rupiah menjadi kacau, hal tersebut diakibatkan oleh serbuan yang mendadak serta bertubi-tubi dari dollar Amerika Serikat serta

³⁰ Sinta Julina, 'Komunikasi Internasional Indonesia Sebagai Presidensi G20 Indonesia 2022 Ditinjau Dari Perspektif Diplomati', *Jurnal Ilmu Komunikasi Citra*, 8.Nomor 1 (2022), 8–17.

³¹ Alvela Salsabilah Putri, 'G20 : Mediator Untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Hubungan Internasional*, 13.1 (2020), 53–64.

³² OCBC Nisp, '5 Penyebab Krisis Moneter 1998 Dan Dampaknya Di Indonesia', *Ocbcnisp.Com*, 2023. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/03/15/penyebab-krisis-moneter-1998> (diakses tanggal 3 Maret 2023)

jatuh temponya kredit swasta luar negeri dalam jumlah yang cukup banyak³³. Tujuan dari G20 itu sendiri adalah untuk memastikan dunia dapat bertahan dan melahirkan pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih baik. Pada awal mulanya, G20 adalah pertemuan antara Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral, namun hingga saat ini G20 terus berkembang dan terus melakukan perkembangan dalam berbagai bidang pembangunan³⁴.

G20 memiliki tiga jenis pertemuan, yakni antara lain Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atau *Summit* yang merupakan puncak dari proses semua pertemuan G20 yakni rapat setingkat kepala negara ataupun pemerintahan. Kemudian pertemuan yang kedua yaitu *Ministerial & Deputies Meetings* atau Pertemuan Tingkat Menteri dan Deputi. Pertemuan ini diadakan pada masing – masing area fokus utama forum. Dalam Finance Track, Ministerial Meetings dihadiri oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral, yang disebut *Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings* (FMCBG). Sementara pertemuan para deputi disebut *Finance and Central Bank Deputies Meetings* (FCBD). Selanjutnya pertemuan ketiga yaitu, Kelompok Kerja atau *Working Groups*. Pertemuan ini memiliki anggota – anggota ahli dari negara G20. Kelompok kerja dalam pertemuan G20 menangani isu – isu khusus terkait dengan program –

³³ Lepi T. Tarmidi, 'Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF Dan Saran', 2018, 1–25.

³⁴Kementerian Luar Negeri, 'Indonesia Usung Semangat Pulih Bersama Dalam Presidensi G20 Tahun 2022', *Kementrian Luar Negeri RI*, 2022. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3288/berita/indonesia-usung-semangat-pulih-bersama-dalam-presidensi-g20-tahun-2022> (diakses tanggal 4 Maret 2023)

program dari G20 dimana selanjutnya kemudian dikelompokkan dalam segmen kementerian dan akhirnya KTT³⁵.

Dalam prosesnya untuk terus memperbaiki keuangan global, G20 memiliki peran nyata yang bisa disaksikan secara global. Misalnya saat menangani krisis keuangan dunia internasional pada tahun 2008. Dalam mengatasi krisis ini G20 juga ikut mengubah dan memperbaiki tatanan keuangan global. Isu ini merupakan salah satu isu terbesar yang sukses ditangani. Isu selanjutnya yaitu masalah kebijakan pajak, G20 telah melajukan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) agar meningkatkan pertukaran informasi terkait pajak, yang mana tujuan dari OECD ini adalah untuk menawarkan berbagai pendekatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta sosial global. Kemudian G20 juga berkontribusi dalam menangani pandemic Covid – 19, yang dimana G20 berinisiatif pada mencakup penanggungan dalam mekanisme pembayaran utang luar negeri bagi negara yang memiliki penghasilan yang rendah, juga pada bantuan seperti hand sanitizer, alat medis, obat – obatan, pengurangan bea masuk untuk vaksin sebanyak >5 triliun USD³⁶.

Selain beberapa isu diatas G20 juga berperan dalam isu internasional yang lain, mialnya iklim dan pembangunan, perdagangan dan lain sebagainya. G20 mendesak (OECD) *Organization for Economic Cooperation and Development* untuk meningkatkan pertukaran informasi mengenai perpajakan. Pada tahun 2012, G20 memelopori kolaborasi

³⁵Bank Indonesia, 'Presidensi G20 Indonesia', Bank Sentral Republik Indonesia, 2020. <https://www.bi.go.id/id/g20/default.aspx> (diakses tanggal 3 Maret 2023)

³⁶Kementerian Luar Negeri, 'Indonesia Usung Semangat Pulih Bersama Dalam Presidensi G20 Tahun 2022', Kementrian Luar Negeri RI, 2022 <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3288/berita/presidensi-g20-indonesia> (diakses tanggal 4 Maret 2023)

internasional *Base Erosion and Profit Sharing* (BEPS) yang dikeluarkan oleh OECD untuk mengakhiri penghindaran pajak, yang diselesaikan pada tahun 2015. Tercatat dalam BEPS, 139 negara anggota serta yurisdiksi bekerja sama agar dapat menyelesaikan penghindaran pajak. G20 juga berkontribusi untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Inisiatif G20 untuk mengatasi pandemi termasuk penangguhan pembayaran utang luar negeri di antara negara-negara berpenghasilan rendah, suntikan USD5 triliun untuk upaya penahanan Covid-19 (Deklarasi Riyadh), pengurangan/penghapusan bea masuk dan pajak serta bea impor yang lebih rendah untuk vaksin, pembersih tangan, desinfektan, peralatan medis dan obat-obatan. Selain itu, G20 juga berperan penting dalam isu internasional lainnya, termasuk perdagangan, perubahan iklim, dan pembangunan. Pada tahun 2016, prinsip kolektif diterapkan pada investasi internasional. G20 juga mendukung gerakan politik yang membentuk Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim pada 2015 dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030³⁷.

Sebagai salah satu wadah diplomasi Indonesia dengan negara lain, Indonesia perlu untuk tetap menjaga agar G20 tetap efektif untuk turut mengatasi masalah ekonomi dunia. Beberapa hal utama yang perlu diupayakan dalam agenda G20 yaitu, tetap menjaga G20 sebagai suatu *informal leader-led forum*. Salah satu kunci kekuatan G20 adalah kerjasama yang sifatnya informal dalam tingkat pemimpin negara. Kekakuan diplomasi dalam fora lain dapat diselesaikan dalam G20. Kedua yaitu, meningkatkan implementasi berbagai komitmen yang telah dibuat. Ketiga, meningkatkan akseptabilitas G20, dapat dipahami bahwa

³⁷ SMI, *G20 Presidency of Indonesia 2022*, 2020. <https://ptsmi.co.id/g20> (diakses tanggal 5 Maret 2023)

keepakatan G20 tidak selalu sepenuhnya diterima oleh negara-negara lain.

G20 berperan sebagai pendorong serta tidak menjadi pengambil alih dalam berbagai pembahasan ditingkat global. Kemudian terakhir yang keempat adalah memelihara poliferasi isu, saat ini perekonomian global belum dapat dikatakan stabil oleh karena itu, diperlukan fokus yang tetap stabil dalam menjaga tata kelola perekonomian global ditengah banyaknya isu global yang lain³⁸. G20 menjadi suatu model kerjasama yang tepat untuk negara – negara di dunia saat ini. G20 memiliki banyak manfaat bagi ekonomi global, maka dari itu segala manfaat yang dimiliki oleh G20 dapat menjadi peluang serta memiliki potensi keuntungan untuk setiap negara agar dapat mencapai kepentingan nasionalnya³⁹.

Alasan Indonesia tergabung dalam forum G20 yaitu, pada saat itu Indonesia dianggap masuk dalam tahap pemulihan setelah bencana krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 dan Indonesia juga dianggap sebagai *emerging economy* yang dinilai memiliki skala serta potensi ekonomi yang signifikan dalam kawasan asia⁴⁰. Dalam proses dan sistem kerjanya, kelompok G20 memiliki presiden yang ditunjuk berdasarkan konsensus anggotanya berdasarkan rotasi regional dan perubahan tahunan. Oleh karena itu, "*troika*" yang terdiri dari kepresidenan sebelumnya, saat ini dan masa depan melakukan komunikasi dan koordinasi intensif setiap tahun untuk menjamin kelangsungan agenda G20.⁴¹. Sebagaimana forum multilateral lainnya, G20 tidak memiliki

³⁸Nugraha, Judha, 'Diplomasi Ekonomi Indonesia: G20 Dan Tantangan Global Tahun 2013', *Fiskal Kemkeu*, 2013, 1–13

³⁹Larasati, Cindy, and Ester Desy Natasya, 'Peran Indonesia Di G-20: Peluang Dan Tantangan', *Jurnal Hubungan Internasional*, X.2 (2017),

⁴⁰ Kementerian Keuangan, *Anggota G20 - Kementerian Keuangan*, 2021.

⁴¹ Juha Jokela, *History Of The G20*, 2019.

sekretariat tetap, agenda dan kegiatannya ditetapkan oleh Presidensi bergilir yang bekerja sama dengan anggota. Sebagaimana disepakati pada KTT Riyadh 2020, Indonesia akan mengambil alih Presidensi G20 pada 2022, dengan tongkat estafet diserahkan dari Italia pada KTT Roma pada 30-31 Oktober 2021⁴².

Keanggotaan Indonesia dalam kelompok G20 merupakan tonggak penting dalam sejarah diplomasi Indonesia dalam berperan aktif dalam kerja sama internasional yang diatur oleh konstitusi. Peran aktif dalam kerja sama internasional tidak lepas dari komitmen Indonesia terhadap agenda global, yang tentunya dapat mempengaruhi kondisi dalam negeri Indonesia. Kepresidenan Indonesia di G20 pada tahun 2021-2022 akan memperkuat posisi Indonesia sebagai *emerging market* yang memiliki peran strategis. Kepresidenan Indonesia di G20 memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi guna mendukung kepentingan nasional dan mendorong kerja sama global yang lebih erat⁴³.

Pada tanggal 1 Desember 2021, Indonesia secara resmi memegang jabatan sebagai presidensi dalam forum G20. Sejak dibentuk pada tanggal 26 September 1999, G20 mempunyai tiga tujuan utama, yaitu pertama, mengoordinasikan kebijakan para anggotanya untuk menjamin stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi global, dan kedua, mendorong regulasi keuangan yang dapat mengurangi berbagai permasalahan, risiko dan mencegah krisis keuangan global dan ketiga penciptaan arsitektur keuangan internasional. Namun keberhasilan G20 sangat bergantung pada bagaimana permasalahan global yang terkait

⁴² SMI, G20 Presidency of Indonesia 2022, 2020. <https://ptsmi.co.id/g20> (diakses tanggal 5 Maret 2023)

⁴³ Suminto, 'The G20 and Global Economic Governance', *Kompas.Id*, 2021.

dengan faktor ekonomi dan non-ekonomi seperti kerusakan lingkungan, layanan kesehatan, kesetaraan pendidikan, dan lain-lain dapat diatasi secara efektif melalui kemitraan global⁴⁴.

Indonesia mengambil alih Presidensi G20 pada saat dunia masih belum pulih dari dampak buruk pandemi Covid-19 yang berdampak pada resesi ekonomi global. Lebih lanjut, meningkatnya risiko dan ketidakpastian akibat bencana iklim serta ketegangan geopolitik harus dikelola oleh Indonesia untuk membangun kerjasama dan tetap fokus pada upaya pemulihan global menuju normalisasi pertumbuhan. Dengan latar belakang tersebut, Presidensi G20 Indonesia mempunyai tiga isu prioritas, yakni transformasi digital, kesehatan global serta transisi energi berkelanjutan, dengan tema menyeluruh *“Recover Together, Recover Stronger”*. Pada acara pembukaan Kepresidenan G20 Indonesia, pada 1 Desember 2021, Presiden Jokowi sambil menyampaikan tema dan tiga prioritas yang menekankan pada penguatan solidaritas dan kebersamaan global untuk mengatasi isu-isu kunci pemulihan ekonomi, kesehatan, dan mengatasi isu-isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan⁴⁵.

Ketiga isu prioritas tersebut dipilih sebagai pilar utama untuk merumuskan strategi percepatan pemulihan yang berkelanjutan, inklusif, dan kuat. Prioritas pertama memperhatikan membangun kesehatan global. Pengalaman pandemi dengan jelas menunjukkan fakta bahwa krisis kesehatan global membutuhkan tanggapan multilateral dan multisektoral. Oleh karena itu, isu prioritas pertama berupaya mengembangkan

⁴⁴ Perry Pada and others, *Kajian Mandiri Presidensi G20 Indonesia*, ed. by Rio Budi Rahmanto (Jakarta Pusat: Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021).

⁴⁵ Dr Temjenmeren, 'Indonesia's G20 Presidency: Factors and Priorities That Set Its Agenda', *Indian Council of World Affairs*, 2023.

ketahanan sistem kesehatan global dan menekankan pada penutupan kesenjangan pendanaan dan pasokan untuk membantu meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang dalam mendistribusikan dan mengelola vaksin. Prioritas kedua sekaligus memprioritaskan pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut. negara berkembang adalah untuk memastikan bahwa proses pemulihan secara keseluruhan tidak membahayakan planet ini untuk generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan peletakan dasar yang kokoh untuk dan percepatan pertumbuhan hijau, yang merupakan ikrar komitmen yang dibuat oleh para pemimpin dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2021. Adapun prioritas ketiga adalah transformasi digital yang dirancang khusus untuk memulihkan tatanan ekonomi global pasca pandemi melalui pemanfaatan teknologi digital. Ini termasuk sektor-sektor yang merupakan sumber potensi pertumbuhan ekonomi baru dan memanfaatkan digitalisasi untuk memajukan literasi dan keterampilan⁴⁶.

Forum G20 sebagai platform kerjasama multilateral digunakan untuk meningkatkan kerjasama dalam sektor ekonomi dan keuangan untuk mencapai tujuan strategis global seperti memperkuat ketahanan ekonomi, transformasi digital, keberlanjutan, pemulihan ekonomi, dan lain sebagainya. Adapun manfaat Presidensi G20 Indonesia antara lain yaitu, pertama presidensi Indonesia merupakan implementasi dari amanat UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial, kedua Indonesia memaksimalkan G20 agar berkontribusi secara aktif untuk mengatasi masalah pandemi Covid-19 dengan kerjasama ketersediaan vaksin dan *crisis resilience* di masa depan yakni

⁴⁶ Dr Temjenmeren, 'Indonesia's G20 Presidency: Factors and Priorities That Set Its Agenda', Indian Council of World Affairs, 2023.

untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi, Indonesia fokus pada pengembangan *start-up* sebagai aktivitas penghasil pendapatan, ketiga Indonesia memobilisasi solidaritas global untuk mengatasi krisis dengan mengoordinasikan kebijakan ekonomi, investasi, kebijakan ekonomi, arus perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, dan pada akhirnya kepresidenan Indonesia di G20 akan mendorong sistem kerja sama ekonomi internasional yang lebih kuat⁴⁷.

Ketika Indonesia memegang jabatan penting dalam forum G20, Indonesia berkesempatan untuk mengupayakan kolaboratif dunia sebagai wujud dari kebijakan yang akan membantu pemulihan ekonomi dunia secara terstruktur melalui forum G20. Selain itu, Indonesia bisa menyetarakan kepentingan nasional dan tujuan negara maju serta negara berkembang. Sebagai presidensi G20, Indonesia juga dapat mewujudkan kepentingan nasionalnya khususnya di bidang perekonomian melalui forum G20 di bidang perdagangan, ketenagakerjaan, kesehatan, pertanian, investasi dan sumber daya manusia⁴⁸.

Sebagai Presidensi G20, Indonesia menggunakan G20 Empower untuk mengembangkan jaringan sektor swasta di antara negara-negara anggota, khususnya mengidentifikasi dan mendukung kepemimpinan perempuan di sektor ini. G20 Empower adalah koalisi yang didedikasikan untuk memperkuat dan mendorong keterwakilan ekonomi perempuan guna meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh perempuan di sektor swasta⁴⁹. G20 Empower memiliki tiga prioritas. Hal ini mencakup

⁴⁷ Wempi Saputra, 'Presidensi G20 Indonesia 2022', November 2021, 2022.

⁴⁸ Mochamad Mochklas and others, 'Indonesia's G20 Economy In 2022: Management Strategy and Challenges', *The Seybold Report*, 17.06 (2022), 2099–2104 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.6821330>>.

⁴⁹ G20 EMPOWER Indonesia Secretariat, *G20 Empower*, 2022. <https://www.g20empower-indonesia.org/id> (diakses tanggal 6 Maret 2023)

peningkatan indikator utama kepemimpinan perempuan di sektor swasta, penguatan komitmen sektor swasta dalam membina UKM yang dipimpin perempuan, dan penerapan praktik terbaik sektor swasta mengenai partisipasi perempuan dalam ekonomi digital⁵⁰.

Indonesia telah mendapatkan banyak peluang dan manfaat dari keikutsertaannya dalam G20, baik sebagai Presidensi maupun sebagai peserta dalam forum tersebut. Terpilihnya Indonesia sebagai Presidensi G20 memiliki nilai strategis bagi pemulihan ekonomi dan tercapainya kepentingan nasional Indonesia, khususnya dalam aspek ekonomi pasca pandemi. Momentum G20 dapat dimanfaatkan dengan memanfaatkan peluang dan tantangan secara optimal guna mengoptimalkan pemulihan ekonomi dan mewujudkan Indonesia Maju⁵¹.

4.2 Bentuk Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam IJEPA

Indonesia dan juga Jepang adalah mitra strategis, keduanya telah menjalin hubungan ekonomi yang erat diberbagai bidang. Indonesia dan Jepang juga memiliki kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Indonesia dan Jepang sudah melaksanakan hubungan diplomatik sejak tahun 1958. Salah satu bentuk kerjasama untuk mencapai kepentingan Indonesia dan Jepang adalah IJEPA⁵². IJEPA adalah suatu perjanjian dalam sektor ekonomi antara Indonesia dan Jepang yang berlandaskan prinsip EPA (*Economic Partnership Agreement*). Pada prinsipnya EPA

⁵⁰Yustiningrum Emilia, 'Indonesia's G20 Presidency: Advantages from Within', *Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN)*, 2021.

⁵¹ Henike Primawanti and others, 'Indonesia's Economic Diplomacy at the G20 Summit', *ICOBEST (International Conference on Business Economics, Social Science & Humanities)*, 2023, 603–10.

⁵²Miljani, *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) & Its Effects on Indonesian and Japanese Economy*, 2007.

memiliki sistem dengan ekonomi keterbukaan pasar, Jepang dan Indonesia saling melakukan hubungan kerjasama ekonomi secara timbal balik⁵³. IJEPA disahkan pada tanggal 20 Agustus 2007 di Jakarta oleh kepala negara Indonesia dan Jepang saat itu. Menurut Setiawan dalam Eko Muji Santoso, IJEPA dilandasi oleh tiga pilar utama yaitu liberalisasi, fasilitasi investasi/perdagangan serta kerjasama⁵⁴. Menurut Safitri dalam Seniawati, Ranti Munif Arif, Guntur Oktaviano Nandito, dan Badiu Ibnu Aly, Indonesia dan Jepang telah melakukan hubungan diplomatiknya sejak bulan Januari 1958, dengan ditandatanganinya perjanjian damai antara Indonesia dan Jepang di Jakarta pada waktu itu⁵⁵.

Perjanjian bilateral IJEPA (Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement) yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Jepang mempunyai tiga prinsip utama yakni liberalisasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas. Liberalisasi berarti adanya usaha dari kedua negara tersebut untuk mengurangi hambatan dalam melaksanakan kegiatan perekonomian seperti investasi maupun ekspor dan impor. Fasilitasi dapat diartikan sebagai suatu hal yang memiliki manfaat satu sama lain antar kedua negara tersebut, misalnya menyediakan fasilitas dalam proses perdagangan sesuai dengan standarnya. Kemudian yang terakhir yaitu, peningkatan kapasitas yang dapat dikatakan sebagai adanya peluang yang sama menguntungkannya antar kedua negara tersebut. Misalnya, dalam memproduksi barang dan meningkatkan daya saing produk tersebut.

⁵³Kementerian Perdagangan, 'IJEPA', *FTA Center Kemendag*, 2021. <https://ftacenter.kemendag.go.id/ijepa> (diakses tanggal 7 Maret 2023)

⁵⁴Eko Muji, Santoso, 'Kerjasama IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement) Dalam Perspektif Strukturalisme', *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 08.01 (2020), 402–9

⁵⁵Seniawati, Ranti Munif Arif, Guntur Oktaviano Nandito, and Badiu Ibnu Aly, 'Kerjasama Jepang Dan Indonesia', *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 1.2 (2021)

Hubungan kerjasama perekonomian antara Indonesia dan Jepang dinilai saling melengkapi satu sama lain. IJEPA memberikan keterbukaan sistem bagi Indonesia dan Jepang untuk melakukan kerjasama dan saling membangun perekonomian untuk kepentingannya masing – masing. Pada tanggal 1 Juli 2008 perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Jepang mulai efektif dan setiap lima tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali. Dalam IJEPA terdapat beberapa sektor yang dikelola dalam perjanjian tersebut, antara lain yaitu, terkait perdagangan barang serta bagaimana pengaturan mengenai asal barang dan prosedur kepabeanan⁵⁶.

Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang di bawah IJEPA merupakan perjanjian bilateral pertama Indonesia. Secara keseluruhan, perjanjian ini mempunyai cakupan yang luas dan bertujuan untuk memperkuat kemitraan ekonomi antar negara, termasuk kerja sama dalam peningkatan kapasitas, liberalisasi, perdagangan dan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan arus barang, investasi dan jasa lintas batas, serta tenaga kerja. mobilitas antar negara. IJEPA melengkapi kerja sama regional seperti ASEAN plus, APEC dan WTO, dan ruang lingkup perjanjian tersebut meliputi: perdagangan barang, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan, penanaman modal (investasi), perdagangan jasa, mobilitas orang (pekerjaan), energi dan sumber daya, sumber daya mineral, hak kekayaan intelektual, pembelian barang dan jasa masyarakat, penanaman modal, peningkatan kerjasama dan lingkungan usaha serta peningkatan kepercayaan perusahaan. Adapun manfaat IJEPA antara lain sebagai berikut :

⁵⁶ Sigit Setiawan, 'Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia Dan Jepang', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 17.2 (2012).

1. Peningkatan kinerja perdagangan barang. Peningkatan kinerja yang dimaksud yaitu perdagangan barang Indonesia dan Jepang setelah implementasi ijepa pada tahun 2009 hingga sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan senilai 155% dimana ekspor senilai 101.7% serta impor senilai 322.1%.
2. Peningkatan kinerja perdagangan jasa. Rata-rata perkembangan perdagangan jasa mengalami perbaikan, yaitu Indonesia mengekspor jasa bisnis ke Jepang serta mengimpor jasa bisnis dan wisata budaya dari Jepang.
3. Peningkatan investasi dengan IJEPA. Dengan adanya IJEPA tentu saja akan berdampak juga akan menarik minat Jepang saat menanamkan investasi di Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan melalui meningkatnya tren investasi Jepang di Indonesia pada tahun 2000 sampai tahun 2008 tercatat sebanyak 2.6% menjadi 28.9% pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2017.
4. Peningkatan pengiriman tenaga kerja. Dengan adanya IJEPA juga membuka lapangan pekerjaan yaitu Jepang membuka peluang pengiriman tenaga kerja perawat (*nurse*) dan perawat lansia (*caregiver*) untuk bekerja di Jepang. Pada tahun 2008 sampai tahun 2017, Indonesia sudah mengirimkan 622 tenaga kerja perawat dan 1.494 tenaga kerja perawat lansia.
5. Peningkatan daya saing. IJEPA kemudian membuat adanya skema *capacity building* yang dapat mendorong tumbuhnya industri pendukung, termasuk UKM, yang akan bermanfaat bagi perkembangan industri di Indonesia.
6. Peningkatan daya beli masyarakat. Meningkatnya daya beli merupakan salah satu implementasi manfaat dari IJEPA dimana meningkatnya

ekspor & investasi, terbukanya lapangan kerja, berkembangnya industri pendukung, dan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan daya beli Masyarakat.

Pada tahun 2017, Jepang merupakan negara tujuan ekspor kedua dan sumber impor ketiga Indonesia. Pada tahun 2017, perdagangan antara Indonesia dan Jepang sebesar 33,03 miliar dolar. Ekspor sebesar \$17,79 miliar, impor \$15,24 miliar, dan surplus \$2,55 miliar. Investasi Jepang sebesar \$4,9 miliar, dengan sektor investasi utama adalah listrik, gas dan air, peralatan transportasi dan transportasi, logam dasar, produk logam, mesin dan elektronik. Ekspor Indonesia ke Jepang didominasi produk batu bara, bijih tembaga, besi tua, karet alam, dan kawat insulasi. Produk impor terpenting Indonesia dari Jepang adalah kendaraan bermotor, suku cadang kendaraan bermotor, mobil dan kendaraan lainnya serta produk beton canai⁵⁷.

Jepang merupakan negara yang menghasilkan industri besar dan berteknologi tinggi seperti kendaraan bermotor, elektronik, peralatan mesin, baja dan logam, kapal laut, bahan kimia, tekstil dan makanan olahan. Jepang mempunyai beberapa ekspor penting yaitu mobil dan kendaraan bermotor, komponen kendaraan bermotor, sirkuit elektronik, mesin, kapal, printer, mesin dan peralatan mekanik, *bulldozer*, *grader*, *excavator*. Tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat, China dan Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Singapura, Jerman, Australia, Vietnam. Produk impor utama Jepang adalah minyak bumi, gas bumi dan hidrokarbon, peralatan telepon, batu bara, sirkuit elektronik, mesin

⁵⁷Kementerian Perdagangan, 'Factsheet Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (JEPA)'.

pengolah data, obat-obatan, bijih besi dan bijih tembaga. Impor penting adalah Indonesia, China, USA, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Turki, Taiwan, Jerman, Thailand, Uni Emirat Arab..

4.2.1 Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

Tren pertumbuhan investasi Jepang di Indonesia pada tahun 2000 hingga 2008 sebesar 2,6 hingga 28,9 persen pada tahun 2009 hingga 2017. Peningkatan pengiriman tenaga kerja dengan adanya IJEPA juga membuka peluang kerja yaitu Jepang membuka peluang pengiriman perawat dan perawat lanjut usia (*nurses*) untuk bekerja di Jepang. Antara tahun 2008 dan 2017, Indonesia mengirimkan 622 caregiver dan 1.494 caregiver lansia. IJEPA kemudian membuat program peningkatan kapasitas yang dapat mendorong pertumbuhan industri pendukung, termasuk UKM, yang akan bermanfaat bagi perkembangan industri Indonesia. Dan peningkatan daya beli merupakan salah satu manfaat penerapan IJEPA, dimana peningkatan ekspor dan investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri pendukung dan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan daya beli masyarakat⁵⁸.

Indonesia dan Jepang mengintensifkan kerja sama untuk mengembangkan sektor manufaktur. Indonesia dan Jepang sepakat untuk melanjutkan kerja sama yang luas untuk

⁵⁸Kementerian Perdagangan, 'Factsheet Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)'.

mengembangkan sektor manufaktur, yang dipandang sebagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kedua negara. Kerja sama bilateral ini ditandai dengan penandatanganan dokumen kerangka kerja antara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Investasi Jepang (METI) Hiroshige Seko di Osaka. Kerja sama ini dalam rangka implementasi proyek *New Manufacturing Industry Development Center* (New MIDEDEC) IJEPA.

Kegiatan MIDEDEC baru mencakup enam sektor otomotif, elektronik, tekstil, makanan dan minuman serta industri kimia dan logam. Selain itu, tujuh lintas sektor terdiri dari pengerjaan logam, cetakan & mati (perkakas), pengelasan, pengembangan UKM, promosi ekspor dan investasi, industri hijau (energi, limbah, emisi), dan industri 4.0 (digitalisasi, otomasi, reformasi kebijakan). Untuk Program New MIDEDEC yang dapat dilaksanakan segera setelah penandatanganan dokumen kerjasama adalah di bidang otomotif dengan melibatkan dua lintas sektor yaitu mold & die (perkakas) dan pengembangan UKM. Sedangkan kegiatan di sektor lain akan dilakukan setelah kedua belah pihak menyiapkan aransemen teknis dan meminta masukan dari pemangku kepentingan terkait⁵⁹.

Indonesia dan Jepang telah sepakat untuk melanjutkan perundingan mengenai Amandemen Protokol dengan tujuan menyelesaikannya pada akhir tahun 2019, setelah peninjauan

⁵⁹ Antaranews, *RI - Japan to Intensify Coop for Development of Manufacturing Sector*, 2019, <https://en.antaranews.com/news/127897/ri-japan-to-intensify-coop-for-development-of-manufacturing-sector> (diakses tanggal 7 Maret 2023)

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (GR-IJEPA) selesai. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin meminta perwakilan untuk meresmikan protokol amandemen sesuai rekomendasi. Selain itu, kedua pemimpin tetap berkomitmen untuk menyelesaikan perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) pada tahun 2019. Kedua negara sepakat untuk melaporkan hasil GR-IJEPA pada akhir Juni 2019 dengan sejumlah rekomendasi⁶⁰.

4.2.2 Meningkatnya Aktivitas Ekspor – Impor

Berikut ini tabel presentasi perdagangan barang antara Indonesia dan Jepang dari tahun 2012 – 2017.

Tabel 4.1 Presentase Perdagangan Barang

| Pemanfaatan IJEPA (%) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Ekspor Indonesia ke Jepang | 47.6 | 59.7 | 57.9 | 54.1 | 47.2 | 50.7 |
| Impor Indonesia dari Jepang | 60.7 | 62.1 | 63.6 | 67.5 | 67.7 | 76.2 |

Sumber data : Factsheet Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)⁶¹

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut terlihat bahwa ekspor Indonesia ke Jepang, tahun 2012 hingga 2013 mengalami peningkatan senilai 12,1%, kemudian pada tahun 2013 hingga 2014 mengalami penurunan senilai 1,8%, selanjutnya pada tahun 2014 hingga 2015 mengalami penurunan senilai 3,8%, kemudian pada tahun 2015 hingga 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 6,9% dan yang terakhir berdasarkan tabel

⁶⁰ Satyagraha, *Amendment of General Review of IJEPA Targeted Completion in 2019-End*, 2019.

⁶¹ Kementerian Perdagangan, 'Factsheet Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)'.

tersebut setelah mengalami penurunan dari 2013 sampai dengan 2016 kemudian pada tahun 2016 ke 2017 ekspor Indonesia ke Jepang mengalami peningkatan sebesar 3,5%. Dapat disimpulkan bahwa ekspor Indonesia ke Jepang berdasarkan tabel 4.1 pada tahun 2012 hingga 2017 mengalami peningkatan namun lebih banyak mengalami penurunan, walaupun begitu pada tahun 2017 ekspor Indonesia ke Jepang kemudian mengalami peningkatan sebesar 3,5% yaitu nilai persentase peningkatan yang paling tinggi sesuai dengan data dalam tabel.

Selanjutnya berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa impor Indonesia dari Jepang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2012 hingga 2017. Pada tahun 2012 ke 2013 peningkatannya sebesar 1,4%, kemudian pada tahun 2013 ke 2014 impor Indonesia dari Jepang mengalami peningkatan sebesar 1,5%, setelah itu pada tahun 2014 ke 2015 peningkatannya sebesar 3,9%, selanjutnya pada tahun 2015 ke 2016 peningkatannya tidak jauh berbeda namun tetap mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,2%. Kemudian yang terakhir berdasarkan data tahunan dalam tabel tersebut yaitu pada tahun 2016 ke 2017 adalah tahun dimana persentase peningkatan impor Indonesia dari Jepang yang paling tinggi yaitu sebesar 8,5%. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data dalam tabel 4.1 pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 impor Indonesia dari Jepang terus mengalami peningkatannya, dapat dilihat dari persentase peningkatannya setiap tahunnya, walaupun pada tahun 2015 ke 2016 persentase peningkatannya hanya sebesar 0,2% namun hal tersebut tetap dikatakan sebagai

peningkatan serta peningkatan yang paling signifikan yaitu pada tahun 2016 ke 2017 sebesar 3,5%.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa dengan adanya Presidensi G20 maka program – program IJEPA dapat lebih terarah dan fokus dalam pencapaian tujuan pelaksanaan programnya. Berikut ini data ekspor – impor migas dan non migas pada tahun 2018 sampai tahun 2020.

Tabel 4.2 Data Ekspor – Impor Indonesia dan Jepang 2018 - 2020

| EKSPOR INDONESIA KE JEPANG | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TAHUN | JAN - DES 2018 | JAN – DES 2019 | JAN – OKT 2020 |
| MIGAS | USD 3,2 | USD 2,194 | USD 608,0 Juta |
| NON MIGAS | USD 16,3 | USD 13,752 | USD 10,445 Juta |
| PERSENTASE PENINGKATAN | 9,44% | 18,1% | (-) 17,3% |
| IMPOR INDONESIA DARI JEPANG (JUTA) | | | |
| TAHUN | JAN - DES 2018 | JAN – DES 2019 | JAN – OKT 2020 |
| MIGAS | USD 33,2 | USD 37,0 | USD 36,8 |
| NON MIGAS | USD 17.943,6 | USD 15,586 | USD 8,809 |
| PERSENTASE PENINGKATAN | 17,96% | 13,1% | (-) 33,7% |

Sumber : Indonesian Trade Promotion Center Osaka⁶²

Berdasarkan tabel 4.2 diatas disebutkan bahwa nilai data ekspor – impor Indonesia dan Jepang persentasenya pada tahun

⁶² Kementerian Perdagangan, Ministry of Trade Republic of Indonesia', *Indonesian Trade Promotion Center Osaka* <<https://itpc.or.jp/publication/statics/>>.

2018 sebesar 9,44% dan impor sebesar 17,96%. Untuk tahun 2019 persentasenya ekspor sebesar 18,1% dan untuk impor 13,1%. Kemudian pada tahun 2020 persentase eksportnya menurun dari tahun 2019 ke 2020 yaitu sebesar 0,8% dan untuk impornya dari 13,1% ke 33,7%.

IJEPA setelah masa presidensi G20 Indonesia mulai terhitung sejak Indonesia menjadi Presidensi G20 yaitu pada tahun 2021. Data ekspor – impor Indonesia dan Jepang pada tahun 2021 sampai dengan januari 2023 dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3 Data Ekspor – Impor Indonesia dan Jepang 2021 - 2023

| EKSPOR INDONESIA KE JEPANG (JUTA) | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| TAHUN | JAN - DES 2021 | JAN – DES 2022 | JAN 2023 |
| MIGAS | USD 978,5 | USD 1,7 | USD 0,3 |
| NON MIGAS | USD 16,877 | USD 23,2 | USD 1,9 |
| PERSENTASE KENAIKAN | 30,7% | 39,01% | 34,14% |
| IMPOR INDONESIA DARI JEPANG (JUTA) | | | |
| TAHUN | JAN - DES 2021 | JAN – DES 2022 | JAN 2023 |
| MIGAS | USD 38,5 | USD 0,1 | USD 0,0 |
| NON MIGAS | USD 14,605 | USD 17,1 | USD 1,4 |
| PERSENTASE KENAIKAN | 37,2% | 17,29% | (-) 1,89% |

Sumber : Indonesian Trade Promotion Center Osaka⁶³

⁶³ Kementerian Perdagangan, 'Ministry of Trade Republic of Indonesia', Indonesian Trade Promotion Center Osaka <<https://itpc.or.jp/publication/statics/>>.

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai ekspor Indonesia ke Jepang bahwa pada tahun 2021 hingga Januari 2023 untuk migas mengalami penurunan dan untuk non migas berdasarkan hasil capaian ekspor pada tahun 2022, target ekspor nonmigas Indonesia ke Jepang berhasil melebihi target yang ditetapkan dengan persentase 136,1%.

Indonesia sudah memimpin negara-negara ekonomi besar untuk melakukan upaya yang matang dalam mewujudkan dunia yang lebih baik bagi masyarakat melalui KTT G20 di Bali pada 15-16 November 2022. Meski waktunya singkat, Indonesia berhasil mengajak negara-negara ekonomi besar untuk membahas solusi konkrit atas krisis yang sedang berlangsung guna menciptakan perdamaian dunia dan mewujudkan kehidupan berkelanjutan melalui budaya dan kearifan lokal. Kearifan nasional Indonesia yang telah lama dimiliki oleh masyarakat dari berbagai suku bangsa mendorong untuk hidup selaras dengan alam, agar bumi dapat terus memenuhi fitrah manusia yang tidak pernah terpuaskan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendukung upaya umat manusia untuk menciptakan dan mengembangkan cara hidup berkelanjutan untuk masa depan. Menghargai nilai-nilai positif gotong royong, toleransi, dan demokrasi, Jokowi dengan khidmat memimpin KTT G20 dan berbicara panjang lebar mengenai krisis yang sedang berlangsung serta menuntut solusi konkrit dari negara-negara besar.

Kepresidenan Indonesia di G20 berhasil mendorong komunitas global untuk menciptakan dunia dengan pembangunan

yang setara, misalnya melalui pembentukan dana pandemi. Dana Pandemi diciptakan untuk membantu negara-negara bersiap menghadapi kemungkinan pandemi di masa depan dan untuk memastikan mekanisme keuangan yang optimal untuk arsitektur kesehatan global dalam mencegah dan mengendalikan pandemi. Dana internasional yang baru dibentuk ini dipimpin oleh Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai penasihatnya, yang akan memberikan masukan mengenai bagaimana negara-negara harus menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah kemungkinan pandemi di masa depan.

4.2.3 Mengoptimalkan Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Selain mendesak negara-negara maju G20 untuk melibatkan negara-negara berkembang dalam mencari solusi permasalahan kesehatan, Indonesia juga mendorong negara-negara berkembang untuk turut serta menjamin rantai pasok, penelitian dan produksi sistem kesehatan global. Komunitas global harus bekerja sama untuk mengurangi kesenjangan dalam pengembangan sistem kesehatan dengan meningkatkan penelitian dan transfer teknologi serta memastikan akses terhadap bahan-bahan produksi layanan kesehatan. Indonesia juga percaya bahwa TRIPS (Pengabaian Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan) tidak hanya mencakup aspek terkait COVID-19, namun harus diperluas ke seluruh produk dan solusi kesehatan, termasuk diagnosis dan pengobatan penyakit.

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian bahwa peran Presidensi G20 terhadap Indonesia dapat dilihat sebagai berikut : *“Pelaksanaan Presidensi G20 memiliki peran yang strategis salah satunya karena melibatkan peran serta masyarakat secara langsung. Meningkatkan kunjungan delegasi ke Indonesia, mendukung peningkatan konsumsi domestik, mengoptimalkan peran UMKM, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu manfaat secara langsung kegiatan presidensi G20 tersebut. Selain itu, rencana strategis dari hasil pertemuan G20 tersebut juga dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia dalam masa pandemi Covid-19”*. Presidensi G20 memiliki peran yang signifikan terhadap Indonesia yaitu salah satunya karena melibatkan peran serta masyarakat secara langsung terkait dengan UMKM. Kemudian, Presidensi G20 Indonesia juga mengoptimalkan peran UMKM yang sejalan dengan isi dari kajian mandiri mengenai Presidensi G20 Indonesia mengenai UMKM yaitu dalam pengembangan ekonomi digital, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memerlukan dukungan untuk mengembangkan usaha tersebut secara digital⁶⁴.

Capaian positif dari Presidensi G20 Indonesia telah disebarluaskan oleh lembaga pemerintah dan komunitas publik untuk membangkitkan kebanggaan warga terhadap kepemimpinan Indonesia di komunitas global. Badan Kependudukan dan Keluarga

⁶⁴ Pada, Perry, Dhani Eko Wibowo, Lucky Nugraha, Rahmawati Wulandari, Sam Aryadi, Diany Ayudana, and others, *Kajian Mandiri Presidensi G20 Indonesia*, ed. by Rio Budi Rahmanto (Jakarta Pusat: Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021)

Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang turut serta menyebarkan kabar baik tentang G20 hingga ke tingkat keluarga agar warga dapat memahami setiap isu yang dibahas dalam G20. BKKBN memanfaatkan berbagai media untuk mempromosikan G20, seperti melalui kegiatan latihan kolektif untuk meningkatkan kesadaran tentang arsitektur kesehatan global dengan perwakilan lembaga, Forum Generasi Perencanaan (GenRe), dan desa keluarga berencana. Badan ini juga mengundang UMKM lokal dan pedagang asongan untuk berpartisipasi dalam pameran G20 untuk meningkatkan mata pencaharian mereka dan membangun keluarga yang tangguh⁶⁵.

4.2.4 Meningkatnya Ekonomi Makro dan Sektor Indonesia

Adapun dalam rencana strategis Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan menjelaskan mengenai manfaat implementasi IJEPA bagi ekonomi makro dan sektoral Indonesia, berdasarkan data hasil wawancara dengan informan penelitian dijelaskan bahwa : *“Sejak tahun 2007 saat IJEPA ditandatangani kedua negara, sudah banyak manfaat yang dirasakan kedua negara dalam implementasi IJEPA tersebut. Salah satu manfaat utama IJEPA terkait ekonomi makro dan sektoral Indonesia adalah peningkatan kinerja perdagangan barang dan adanya peningkatan investasi Jepang di Indonesia”*.

⁶⁵ Antaranews, *Indonesia's G20 Presidency Crusades to Realize a Better World*, 2022, <https://en.antaranews.com/news/260781/indonesias-g20-presidency-crusades-to-realize-a-better-world> (diakses tanggal 9 Maret 2023)

Indonesia dan Jepang telah sepakat untuk menyelesaikan protokol perubahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA) dan menandatangani di sela-sela KTT G20 di Bali pada bulan November. Hal itu merupakan salah satu kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo. Kedua pemimpin juga sepakat untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Jepang di bidang perdagangan dan investasi dalam pertemuan tersebut.

Presiden Joko Widodo juga menyambut baik sejumlah investasi baru Jepang di Indonesia dan menyampaikan apresiasinya terhadap beberapa proyek yang telah selesai tepat waktu sekaligus mengajak Jepang untuk melakukan investasi baru di beberapa sektor. Presiden RI meminta dukungan sektor iptek Jepang dalam beberapa proyek strategis, terutama untuk hilirisasi komoditas alam, pengembangan mobil dan sepeda motor listrik, serta di bidang kesehatan dan pangan. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Jepang terhadap Presidensi G20 Indonesia yang telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemulihan ekonomi global⁶⁶.

Berdasarkan data yang ditemukan dalam wawancara melalui informan penelitian hal tersebut sejalan dengan data yang diperoleh dari FTA Center Kementerian Perdagangan yaitu, dalam

⁶⁶ Antaranews, *Indonesia - Japan to Ink Revised IJEPA On Sidelines of G20 Summit*, 2022, <https://en.antaranews.com/news/241493/indonesia-japan-to-ink-revised-ijepa-on-sidelines-of-g20-summit> (diakses tanggal 9 Maret 2023)

perdagangan Indonesia – Jepang setelah implementasi IJEPA pada tahun 2009 hingga tahun 2017 meningkat senilai 155% dimana ekspor senilai 101,7% dan impor senilai 322,1%. Kemudian dalam meningkatnya investasi yaitu IJEPA dapat menarik daya tarik Jepang dalam menanamkan investasi di Indonesia, hal tersebut terbukti dengan meningkatnya tren investasi Jepang di Indonesia dari kisaran 2,6% pada tahun 2000 hingga tahun 2008 menjadi 28,9% pada tahun 2009 hingga tahun 2017⁶⁷.

4.2.5 Presidensi G20 Indonesia dalam Meningkatkan Kerjasama Bilateral Indonesia dan Jepang

Terkait Indonesia sebagai Presidensi G20, dapat dilihat Presidensi G20 Indonesia ini memberikan pengaruh terhadap kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang khususnya IJEPA, sesuai dengan data yang diperoleh melalui informan penelitian bahwa : *“Indonesia sebagai presidensi forum G20 menjadi suatu keuntungan dalam berbagai sistem terutama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dimana keikutsertaan Indonesia dalam forum resmi G20 sangat berpengaruh terhadap peluang Indonesia dalam meningkatkan kerjasama baik Internasional maupun kerjasama bilateral sektor perdagangan salah satunya dalam perjanjian IJEPA”*.

⁶⁷Kementerian Perdagangan, *IJEPA*, 2021, <https://ftacenter.kemendag.go.id/ijepa> (diakses tanggal 10 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian tersebut sejalan dengan data yang diperoleh melalui artikel jurnal yang menjelaskan bahwa G20 merupakan forum yang dapat digunakan Indonesia untuk memberikan partisipasi sebanyak – banyaknya. Sebagai Presidensi G20, Indonesia memberikan pesan untuk dunia internasional dalam rangka menjalin hubungan interaktif. Tujuan dan manfaat dari kerjasama global akan membuat Indonesia menerima manfaat berupa perolehan pengetahuan dan informasi lebih cepat serta aspirasi dari kepentingan nasional memiliki hubungan timbal balik dengan tingkat hubungan diplomatis, disisi lain kedudukan sebagai Presidensi ini juga dapat menarik kembali tingkat kepercayaan dari masyarakat. Presidensi G20 Indonesia memberikan efek positif terutama dengan perjanjian IJEPA, dalam pembahasannya kerjasama IJEPA yang dilakukan terhadap perubahan protokol adalah perdagangan barang dan jasa, investasi, dan meningkatkan SDM⁶⁸.

Sehubungan dengan informasi mengenai peranan Badan Kebijakan Perdagangan terkait kerjasama IJEPA yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian diuraikan bahwa : *“Berdasarkan data dari Badan Kebijakan Perdagangan, pada tahun 2018, perwakilan Badan Kebijakan Perdagangan menjadi narasumber dalam acara Rapat Koordinasi Pembahasan*

⁶⁸Kurniawan, Muhammad Fadly, 'Potensi Indonesia Dalam Penyaluran Kepentingan Melalui IJEPA Pasca KTT G20 Di Indonesia', January, 2023.

Persiapan General Review Indonesia - Jepang Economic Partnership Agreement ke-8”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian sejalan dengan data yang diperoleh dari website Badan Kementerian Perdagangan mengenai kepala pusat pengkajian kerjasama perdagangan dalam rapat koordinasi persiapan General Review IJEPA ke – 8 yang dihadiri oleh Kemenko Perekonomian, Kemenlu, Kemenkeu, Kemenperind, Kementan, Kemenkes, Kemen LHK, Kemen BUMN, dan BPOM⁶⁹. Bagi Indonesia, penyelesaian GR-IJEPA menunjukkan semakin pentingnya negara-negara di dunia untuk mempererat hubungan ekonominya di tengah gesekan perdagangan dunia saat ini. GR-IJEPA meliputi isu perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, gerakan buruh (MNP), kerjasama, pengadaan barang/jasa pemerintah, ketentuan asal barang, perbaikan iklim usaha, dan kekayaan intelektual.

Sehubungan dengan bagaimana kondisi kerjasama Indonesia dan Jepang sebelum dan setelah Presidensi diuraikan oleh informan penelitian bahwa : *“Sejak tahun 2007, hubungan kerjasama Indonesia-Jepang sudah berjalan dengan dilandasi perjanjian Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Terkait dengan presidensi G20 oleh Indonesia, Pemerintah Jepang juga menyampaikan apresiasinya atas*

⁶⁹Kementerian Perdagangan, *Kepala Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional Dalam Rapat Koordinasi Persiapan General Review IJEPA Ke-8*, 2018, <https://bkperdag.kemendag.go.id/> (diakses tanggal 13 Maret 2023).

pelaksanaan G20 yang menyuarakan pesan kuat dalam perdamaian dan pemulihan ekonomi dunia". Berdasarkan data yang diambil melalui wawancara dengan informan penelitian dapat dijelaskan bahwa dengan adanya Presidensi G20 Indonesia, citra Indonesia semakin baik dimata Jepang oleh karena itu Jepang kemudian menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan G20 yang telah dilakukan oleh Indonesia sebagai Presidensi pada tahun 2022.

Kemudian yang teakhir terkait apakah dengan Indonesia menjadi Presidensi G20 hal tersebut berpengaruh terhadap diplomasi ekonomi antara Indonesia dan Jepang? Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian ditemukan bahwa : *"Tentu berpengaruh, salah satunya di bidang perdagangan. Dimana kedua negara sepakat mengintensifkan negosiasi IJEPA (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement) dan mengurangi hambatan perdagangan agar lebih menguntungkan kedua negara*". Berdasarkan hasil temuan data wawancara dengan informan penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan Indonesia menjadi Presidensi G20 hal tersebut berpengaruh terhadap diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang. Dengan Indonesia menjadi Presidensi G20, Indonesia dan Jepang kemudian sepakat untuk mengintensifkan negosiasi IJEPA serta berupaya untuk mengurangi hambatan perdagangan agar kedua negara tersebut memperoleh keuntungan yang lebih. Menjadi Presidensi G20 bagi Indonesia juga menjadi citra yang baik untuk Indonesia dimata dunia dan juga khususnya bagi Jepang.

Uraian hasil wawancara diatas mencerminkan bahwa IJEPA memiliki korelasi positif dengan Presidensi G20 Indonesia. Dapat dikatakan pula bahwa pengembangan IJEPA merupakan dampak dari dijadikannya Indonesia sebagai Presidensi G20.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Presidensi G20 berpengaruh terhadap pengembangan kerjasama IJEPA, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pengaruh yang dijelaskan pada bab hasil dan pembahasan dimana adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja, meningkatnya aktivitas ekspor – impor, mengoptimalkan peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), meningkatnya ekonomi makro dan sektoral Indonesia serta tentunya Presidensi G20 Indonesia dapat meningkatkan kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang sehingga dapat dikatakan pula bahwa pengembangan IJEPA merupakan dampak dari dijadikannya Indonesia sebagai Presidensi G20.

5.2 Saran

1. Indonesia dan Jepang tetap mempertahankan dan semakin meningkatkan hubungan kerjasama yang tengah berlangsung ataupun yang akan datang.
2. Indonesia melanjutkan hal positif yang telah dicapai selama menjadi Presidensi G20.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Alvela Salsabilah Putri, 'G20 : Mediator Untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia',
Jurnal Hubungan Internasional, 13.1 (2020), 53–64.

Anggraeni Nurshinta Anggia, 'Diplomasi Ekonomi Jepang Dalam Upaya
Perpindahan Limbah B3 Melalui Indonesia - Japan Economic Partnership
Agreement (IJEPA)', PIR, 3.2 (2019), 156–72.

Cindy Larasati and Ester Desy Natasya, 'Peran Indonesia Di G-20: Peluang Dan
Tantangan', Jurnal Hubungan Internasional, X.2 (2017), 147–59
<[https://www.researchgate.net/publication/342554611_Peran_Indonesia_
di_G20_Peluang_dan_Tantangan/link/5efb2f8b92851c52d609e88e/downl
oad](https://www.researchgate.net/publication/342554611_Peran_Indonesia_di_G20_Peluang_dan_Tantangan/link/5efb2f8b92851c52d609e88e/download)>.

Denura Jihan Salsabilla and Sari Viani Puspita, 'Diplomasi Ekonomi Indonesia
Ke Bangladesh: Studi Kasus Ekspor Gerbong Kereta', Padjadjaran Journal
of International Relations, 3.2 (2021), 212–27
<<https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.31172.33468>>.

Eko Muji, Santoso, 'Kerjasama IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership
Agreement) Dalam Perspektif Strukturalisme', EJournal Ilmu Hubungan
Internasional, 08.01 (2020), 402–9

Henike Primawanti and others, 'Indonesia's Economic Diplomacy at the G20
Summit', ICOBEST (International Confrence on Business Economics,
Social Science & Humanities, 2023, 603–10.

Ida Bagus, Made Maha Dwi Putra, Elik Astari Anak Agung, and Indiani Ni Luh, 'Kajian Pemanfaatan Presidensi G20 Indonesia Ditinjau Dari Sektor Perdagangan Bilateral Indonesia Dan Jepang', *Nusantara Hasana Journal*, 2.3 (2022), 269–78

Jihan Salsabilla Denura and Sari Viani Puspita, 'Diplomasi Ekonomi Indonesia Ke Bangladesh: Studi Kasus Ekspor Gerbong Kereta', *Padjajaran Journal of International Relations*, 3.2 (2021), 212–27
<<https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.31172.33468>>

Judha Nugraha, 'Diplomasi Ekonomi Indonesia: G20 Dan Tantangan Global Tahun 2013', *Fiskal Kemkeu*, 2013, 1–13
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Diplomasi_ekonomi_Indonesia_G20_dan_tantangan_global_tahun_2013.pdf>.

Killian P.M Erza, 'Paradigma Dan Problematika Diplomasi Ekonomi Indonesia', *Global & Strategis*, 6.2 (2012), 170–85.

Kurniawan, Muhammad Fadly, 'Potensi Indonesia Dalam Penyaluran Kepentingan Melalui IJEPA Pasca KTT G20 Di Indonesia', January, 2023.

Liana Hasanah, 'Kerja Sama Indonesia-Jepang Dalam Joint Credit Mechanism (JCM) Pada Pembangunan Rendah Karbon Di Indonesia', 1.2 (2019), 142–55 <<https://doi.org/10.24198/padjir.v1i2.>>.

Mariane Olivia Delanova, 'Analisis Kebijakan Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Pasar Non Tradisional: Tantangan Dan Peluang', *Dinamika Global Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 4.2 (2019), 382–402.

Miljani, *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) & Its Effects on Indonesian and Japanese Economy*, 2007.

Mochamad Mochklas and others, 'Indonesia's G20 Economy In 2022: Management Strategy and Challenges', *The Seybold Report*, 17.06 (2022), 2099–2104 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.6821330>>.

Nabilla Natasha, 'Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Neraca Perdagangan Di Tengah Pandemi Covid-19', *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8.2 (2021), 227–39 <<https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.15925>>.

Nugraha, Judha, 'Diplomasi Ekonomi Indonesia: G20 Dan Tantangan Global Tahun 2013', *Fiskal Kemkeu*, 2013, 1–13

Pantri Muthriana Erza Killian, 'Diplomasi Ekonomi Sebagai Kajian Dan Agenda Riset: Isu Praktis, Konseptual Dan Metodologis', *Global & Strategis*, 15.1 (2021), 65 <<https://doi.org/10.20473/jgs.15.1.2021.51-78>>

Riana Era, 'Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Dalam Mendukung Program One Village One Product (OVOP) Di Indonesia 2013-2015', 3.1 (2016), 1-6.

Seniawati, Ranti Munif Arif, Guntur Oktaviano Nandito, and Badiu Ibnu Aly, 'Kerjasama Jepang Dan Indonesia', *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 1.2 (2021)

Sigit Setiawan, 'Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia Dan Jepang', Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 17.2 (2012).

Sinta Julina, 'Komunikasi Internasional Indonesia Sebagai Presidensi G20 Indonesia 2022 Ditinjau Dari Perspektif Diplomati', Jurnal Ilmu Komunikasi Citra, 8.Nomor 1 (2022), 8–17.

Yusron, Avivi, and Siagian Muhnizar, 'Kepentingan Indonesia Dalam Kerjasama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)', Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 3.1 (2020), <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2967>

Yustiningrum Emilia, 'Indonesia's G20 Presidency: Advantages from Within', Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN), 2021.

Zulkifli, 'Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia)', 2012.

Buku :

Dr Temjenmeren, 'Indonesia's G20 Presidency: Factors and Priorities That Set Its Agenda', Indian Council of World Affairs, 2023.

Jernadu Ph D Prof. Aleksius and others, Kinerja Diplomasi Ekonomi: Evaluasi Atas Perjanjian Perdagangan Dan Investasi, ed. by Fikry Cassidy (Jakarta Pusat: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri RI, 2015).

Juha Jokela, History Of The G20, 2019.

Lepi T. Tarmidi, 'Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF Dan Saran', 2018, 1–25.

Pada, Perry, Dhani Eko Wibowo, Lucky Nugraha, Rahmawati Wulandari, Sam Aryadi, Diany Ayudana, and others, Kajian Mandiri Presidensi G20 Indonesia, ed. by Rio Budi Rahmanto (Jakarta Pusat: Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021)

Prof Dr Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, ed. by Sofia Yustiyani Suryandari, Kedua (IKAPI (Anggota Ikatan Penerbit Indonesia), 2018).

Sukandarrumudi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, 2004.

Syarifah Zhavira Maziyya, 'Bab III Metodologi Penelitian', 2014.

Website :

Antaraneews, Indonesia - Japan to Ink Revised IJEPAs On Sidelines of G20 Summit, 2022, <https://en.antaraneews.com/news/241493/indonesia-japan-to-ink-revised-ijepa-on-sidelines-of-g20-summit> (diakses tanggal 9 Maret 2023)

Antaraneews, Indonesia's G20 Presidency Crusades to Realize a Better World, 2022, <https://en.antaraneews.com/news/260781/indonesias-g20-presidency-crusades-to-realize-a-better-world> (diakses tanggal 9 Maret 2023)

Antaraneews, RI - Japan to Intensify Coop for Development of Manufacturing Sector, 2019, <https://en.antaraneews.com/news/127897/ri-japan-to>

intensify-coop-for-development-of-manufacturing-sector (diakses tanggal 7 Maret 2023)

Bank Indonesia, 'Presidensi G20 Indonesia', Bank Sentral Republik Indonesia, 2020. <https://www.bi.go.id/id/g20/default.aspx> (diakses tanggal 3 Maret 2023)

G20 EMPOWER Indonesia Sekretariat, G20 Empower, 2022. <https://www.g20empower-indonesia.org/id> (diakses tanggal 6 Maret 2023)

Kementerian Keuangan, Anggota G20 - Kementerian Keuangan, 2021.

Kementerian Luar Negeri, 'Indonesia Usung Semangat Pulih Bersama Dalam Presidensi G20 Tahun 2022', Kementerian Luar Negeri RI, 2022. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3288/berita/indonesia-usung-semangat-pulih-bersama-dalam-presidensi-g20-tahun-2022> (diakses tanggal 4 Maret 2023)

Kementerian Perdagangan, 'Factsheet Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)'.
(diakses tanggal 10 Maret 2023)

Kementerian Perdagangan, 'IJEPA', FTA Center Kemendag, 2021. <https://ftacenter.kemendag.go.id/ijepa> (diakses tanggal 7 Maret 2023)

Kementerian Perdagangan, 'Ministry of Trade Republic of Indonesia', Indonesian Trade Promotion Center Osaka <<https://itpc.or.jp/publication/statics/>>.

Kementerian Perdagangan, IJEPA, 2021, <https://ftacenter.kemendag.go.id/ijepa> (diakses tanggal 10 Maret 2023)

Kementerian Perdagangan, Kepala Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional Dalam Rapat Koordinasi Persiapan General Review IJEPA Ke-8, 2018, <https://bkperdag.kemendag.go.id/> (diakses tanggal 13 Maret 2023).

Kementerian Perdagangan, Ministry of Trade Republic of Indonesia', Indonesian Trade Promotion Center Osaka <<https://itpc.or.jp/publication/staticks/>>.

OCBC Nisp, '5 Penyebab Krisis Moneter 1998 Dan Dampaknya Di Indonesia', Ocbcnisp.Com, 2023. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/03/15/penyebab-krisis-moneter-1998> (diakses tanggal 3 Maret 2023)

Satyagraha, Amendment of General Review of IJEPA Targeted Completion in 2019-End, 2019.

SMI, G20 Presidency of Indonesia 2022, 2020. <https://ptsmi.co.id/g20> (diakses tanggal 5 Maret 2023)

Suminto, 'The G20 and Global Economic Governance', Kompas.Id, 2021.

Wempi Saputra, 'Presidensi G20 Indonesia 2022', November 2021, 2022.